

BAB 4 PEMBAHASAN

4.1 Pendahuluan

Ada beberapa hal penting yang menjelaskan resistensi lokal sebagai simpul analisis atas persoalan tambang di Manggarai, Flores, NTT. Resistensi mencerminkan perubahan pandangan dan sikap masyarakat lokal terhadap industri tambang. Resistensi lokal memberikan penjelasan tentang regulasi, operasi dan dampak tambang bagi masyarakat lokal dan lingkungan hidup. Ada faktor-faktor penting yang mendorong resistensi lokal.

4.2 Manggarai sebagai Konteks Persoalan¹

4.2.1 Keadaan Geografis

Manggarai adalah sebuah kabupaten yang termasuk dalam wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur. Secara administratif di bagi menjadi 227 desa dan 27 kelurahan dengan Ruteng sebagai ibu kota dan pusat pemerintahannya. Secara geografis wilayah kabupaten Manggarai terletak di antara 8⁰14' LS-09⁰00 LS dan 120⁰20' BT – 120⁰30' BT. Kabupaten ini memiliki luas 4.188,9 km² atau 418.897 ha dengan batas-batas sebagai berikut:²

¹Manggarai dalam pembahasan ini Kabupaten Manggarai sebelum pemekaran menjadi Manggarai dan Manggarai Timur. Semua kebijakan pertambangan berhubungan dengan wewenang regulasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai, Provinsi NTT.

²Lihat www.manggarai.go.id, diakses, 23 Maret 2009

Gambar 4.1. Peta Kabupaten Manggarai



- Sebelah Barat, dengan kabupaten Manggarai Barat;
- Sebelah Utara, dengan Laut Flores;
- Sebelah Timur, dengan Manggarai Timur
- Sebelah Selatan, dengan Laut Sawu.

4.2.2 Topografi

Bentangan alam Manggarai merupakan daerah perbukitan dengan sejumlah gunung yang tinggi dan rata-rata berada pada ketinggian antara 100 – 1000 m di atas permukaan laut (m dpl). Di antara bukit-bukit dan gunung yang tinggi terdapat dataran rendah yang subur. Topografi seperti ini menjadikan Manggarai sebagai daerah sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan dengan aneka tanaman perdagangan.

Sebagian besar lokasi Manggarai (70,45%) mempunyai tingkat kemiringan di atas 40⁰. Keadaan ini membuat pembangunan di Manggarai menjadi mahal dan akses masyarakat menjadi sulit ke tempat-tempat lain, baik di dalam maupun di luar Manggarai. Karena itu pula pemanfaatan tanah untuk kegiatan produktif masih terbatas. Dari total luas 418,897 ha, hanya 16,06% (\pm 63 ha) yang telah dimanfaatkan untuk perkampungan, pertanian dan perkebunan. Sementara itu, keadaan iklimnya terdiri dari dua musim, musim hujan dan musim kemarau. Jumlah curah hujan rata-rata mencapai 2.440,9 mm dengan 7 bulan basah setiap tahun dan tingkat kelembaban udara di atas 80 %.³

4.2.3 Keadaan Kependudukan

Jumlah penduduk Manggarai pada tahun 2006 sebanyak 510.744 jiwa dan 108.278 KK. Tingkat kepadatan penduduknya sebesar 122,82 jiwa/km². Distribusi jumlah penduduk dan kepadatan penduduk pada tahun 2006 terkonsentrasi di 6 (enam) kecamatan, yaitu Satar Mese, Borong, Poco Ranaka, Langke Rembong, Ruteng dan Wae Ri'i. Dari segi usia, jumlah terbesar berada pada penduduk dengan usia 15-64 tahun, 57,11% dari total penduduk Manggarai. Rata-rata pertumbuhan penduduk sesuai SUPAS 2005 adalah 2,01% per tahun. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata laju pertumbuhan penduduk NTT yang hanya sebesar 1,8% per tahun.

4.2.4 Keadaan sosial Ekonomi

³Suatu Penelitian ilmiah tentang Perubahan iklim Global menyebutkan bahwa sejak tahun 1990, curah hujan di Manggarai telah berkurang dari 6 bulan per tahun, Majalah Tempo Desember, 2007.

Perekonomian Manggarai memiliki sejumlah sektor unggulan yang dapat dikembangkan untuk membangun perekonomian lokal. Menurut data resmi Pemerintah Kabupaten Manggarai⁴, sektor unggulan dimaksud adalah pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, kehutanan, pariwisata dan pertambangan. Sumbangan sektor unggulan terhadap perekonomian Manggarai pada tahun 2001 mencapai 62.87% dan meskipun prosentasinya terus menurun dari tahun ke tahun, sektor unggulan tetap mendominasi struktur perekonomian Manggarai. Pada tahun 2006 sumbangannya sebesar 51.09%, sedangkan sektor sekunder hanya mencapai 8,32% yang berasal dari industri dan pengolahan, listrik dan air bersih serta konstruksi; dan sektor tersier, yakni sektor jasa kontribusinya mencapai 23,59% dibandingkan pada tahun 2001 yang hanya 12,97%.

Lebih dalam, kontribusi sektor unggulan terbesar terhadap PAD pada tahun 2006 berasal dari sektor pertanian, sebesar 48,77%, disusul dengan sektor jasa sebesar 23,59%, perdagangan, perhotelan dan restoran, 10,47%, konstruksi sebesar 7,09%. Sektor pertambangan yang dikategorikan sebagai sektor unggulan memiliki kontribusi hanya sebesar 2,32%, masih lebih kecil dibandingkan dengan sektor angkutan dan komunikasi yang memiliki kontribusi sebesar 3,77%. Kontribusi setiap sektor perekonomian tersebut mempengaruhi juga pertumbuhan ekonomi Manggarai. Selama beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Manggarai mengalami fluktuasi. Pada tahun 2004 pertumbuhan ekonomi Manggarai sebesar 3,84% dan mengalami kenaikan pada tahun 2005, dengan angka pertumbuhan sebesar 3,94%; tetapi pada tahun 2006, mengalami penurunan sehingga angka pertumbuhannya hanya sebesar 3,90%.

Keadaan perekonomian seperti ini berdampak pada pendapatan per kapita Manggarai. Rata-rata pendapatan per Kapitan masyarakat Manggarai pada tahun 2006 sudah mencapai RP.2.149.202,- meningkat dari Rp.2.040.926,- pada tahun 2005. Dari 12 kecamatan di Manggarai, kecamatan dengan pendapatan per Kapita terbesar adalah Langke Rembong, disusul Reok, Wae Ri'i dan Lambaleda.

⁴ Potensi Unggulan bidang Agribisnis, Komoditi Unggulan di Kabupaten Manggarai, www.manggarai.go.id, diakses 23 Maret 2009. Sumbangan sektor-sektor lain terhadap PDRB Kabupaten Manggarai: Jasa-jasa 17,71%, Perdagangan, Hotel dan restoran 10,26%, Bangunan / Konstruksi 7,44%; Pengangkutan dan komunikasi 4,19%; Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 2,85%; Pertambangan dan Penggalian 2,45%; Industri Pengolahan 1,04%; Listrik dan Air Bersih 0,35%, Sumber, BPS Kabupaten Manggarai, 2004, www.manggarai.go.id, diakses 23 Maret 2009.

Perdapatan per Kapita terendah pada tahun 2006 ditemukan di kecamatan Cibai, yakni Rp.1.608.216,-

4.2.5 Pandangan tentang Wujud Tertinggi, Manusia dan Alam

Masyarakat Manggarai mempunyai pandangan tentang wujud tertinggi, manusia dan alam yang bersifat kosmik. Nilai-nilai sosial dan budaya berkaitan dengan kesatuan hidup antara manusia dan alam sekitarnya. Nilai-nilai sosial budaya ini menentukan pandangan masyarakat Manggarai terhadap pola-pola kehidupan baru di sekitarnya.

4.2.5.1 Pandangan Mengenai Wujud Tertinggi

Orang Manggarai mengakui adanya Wujud Tertinggi. Mereka menyebut Wujud Tertinggi itu dengan banyak nama, seperti *Mori (n)*, *Mori (n) agu Ngaran*, *Mori Keraéng*, *Mori Somba*, dan lain-lain. Nama-nama itu berkaitan erat dengan manusia dan dunianya sehingga boleh dikatakan bahwa pandangan orang Manggarai tentang Wujud Tertinggi bersifat antropomorfistik. Meskipun ada banyak nama yang diberikan kepada Wujud Tertinggi, tetapi *Mori Keraéng* merupakan nama yang paling lazim dan paling sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang Manggarai.

Sebuah studi mengenai Wujud Tertinggi orang Manggarai telah dibuat oleh J.A.J. Verheijen (1991). Menurut hasil studi ini orang Manggarai melihat *Mori Keraéng* sebagai pencipta, pemelihara dan pemilik segala sesuatu. *Mori Keraéng* merupakan penyebab segala yang ajaib di dalam alam jagad raya ini, pemberi hal-hal yang buruk, pemberi kekuasaan dan ilmu pengetahuan. Wujud Tertinggi inilah yang memberikan kesejahteraan dan kemakmuran dan juga menghukum orang-orang yang jahat. Dia jugalah yang menentukan umur seseorang. Dengan pandangan seperti ini maka segala tindak tanduk manusia Manggarai selalu memperhitungkan hubungannya dengan *Mori Keraéng*.

Untuk menjalin hubungan dengan Wujud Tertinggi, *Mori Keraéng*, orang Manggarai melakukan sejumlah kegiatan. Verheijen (1991: 120-162) menyebut beberapa cara orang Manggarai berhubungan dengan Wujud Tertinggi, yakni: melakukan doa-doa pribadi dan keluhan tanpa persembahan, bersungut-sungut

terhadap *Mori Keraéng* dan mengutuk diri, mengutuk dan menyerapahi, doa dan ritus pribadi, doa dan ritus keluarga atau klan, upacara-upacara umum yang berkaitan dengan kehidupan bersama. Melalui ritus-ritus dan tindakan-tindakan ini, orang Manggarai berusaha menciptakan hubungan yang harmonis dengan *Mori Keraéng*: mempertahankan yang baik dan memperbaiki yang telah rusak akibat perbuatan manusia.

Pandangan seperti ini amat mempengaruhi keyakinan religius orang Manggarai. Oleh karena itu, biarpun dewasa ini bagian terbesar orang Manggarai (hampir 95%) menganut agama Katolik Roma, keyakinan seperti itu masih tetap mempengaruhi mereka (Mirsal, 2004: 33), bahkan dalam praktek religius orang Manggarai lebih menampilkan sebuah sinkretisme yang kental antara tradisi Katolik Roma dan ritus-ritus religius tradisional.

4.2.5.2 Pandangan Mengenai Manusia

Pemikiran orang Manggarai mengenai manusia tampak paradoksal. Di satu sisi orang Manggarai melihat manusia sebagai satu kesatuan, baik sebagai individu dalam hubungan dengan masyarakat secara keseluruhan, maupun antara dunia batin/spiritual dan dunia lahir. Di sisi lain, orang Manggarai juga membuat pemisahan antara orang luar dan orang dalam, dunia batin dan dunia lahir (bdk. Erb, 1999: 20-35). Ungkapan yang terkenal mengenai pemisahan manusia adalah *ata pe'ang* (orang luar) dan *ata one* (orang dalam). Pemisahan itu tidak hanya ketika mereka berhubungan dengan orang dari kelompok lain, tetapi sejak lahir seseorang sudah dibedakan apakah ia termasuk orang dalam atau orang luar. Jika yang lahir adalah anak perempuan maka ia adalah 'orang luar' karena kelak ia akan menikah dengan anggota suku lain dan tergabung dalam keluarga suami. Sebaliknya jika yang lahir adalah anak laki-laki maka ia adalah 'orang dalam' karena ia akan menjadi pewaris dan penerus keturunan suku. Pandangan ini mempengaruhi juga sistem perkawinan orang Manggarai yang lebih menekankan kedekatan hubungan darah yang disebut perkawinan 'tungku'.

Selanjutnya, mengenai pemisahan antara dunia batin/spiritual dan dunia lahir, bisa terlihat dalam pandangan mengenai orang yang telah mati. Bagi orang Manggarai hidup hanya sekali dan sesudah itu mati. Orang yang telah mati adalah

orang yang sudah berpisah dari hidup sekarang. Ia tidak dapat hidup lagi. Ia sudah berada dalam dunia yang berbeda dengan manusia. Ada ritus khusus yang menegaskan oposisi hubungan itu, yakni upacara *kélas*. Dengan *kélas* hubungan antara orang yang dhidup dan orang yang mati diakhiri. Orang yang telah mati tidak lagi hidup dan bertindak atas cara manusia di dunia. Menurut Meribeth Erb pandangan ini mempengaruhi orang Manggarai menganggap regenerasi keturunan sebagai sesuatu yang penting.

Meskipun demikian, cara pandang mengenai dua sisi dunia manusia bukanlah pemisahan yang mutlak. Sebagai masyarakat agraris orang Manggarai tetap bergantung pada dunia di sekitarnya dan dunia batin/spiritual tidak bisa dipisahkan secara mutlak dari dunia lahir, demikian juga *ata pe'ang* dari *ata one*. Bagi orang Manggarai segala sesuatu merupakan satu kesatuan dalam keseluruhannya, saling berkaitan dan membentuk harmoni yang lestari. Bagi orang Manggarai, manusia merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dunia sekitarnya, termasuk dengan sesama manusia. Tidak ada pemisahan secara tegas antara manusia dan dunianya, antara dunia batin dan dunia lahir. Kesatuan dan harmoni dengan alam dan sesama tetap dijaga.

Seorang Manggarai melihat dirinya dalam hubungan kebersamaan dengan orang lain. Individu berperan dan berfungsi sejauh ia berada dalam kebersamaan dengan orang lain, entah di dalam suku ataupun di dalam kebersamaan lalu-lintas suku. Kebersamaan itu terlihat jelas dalam upacara-upacara untuk menghormati dan merayakan kehidupan (kelahiran, perkawinan dan kematian, keberhasilan dalam usaha). Upacara terkenal adalah *penti* (sebuah pesta syukur panen, yang sekarang sudah lebih luas dipahami sebagai syukur atas keberhasilan).

Akan tetapi tidak bisa juga disangkal bahwa pengaruh pendidikan dan perkembangan dunia secara keseluruhan dewasa ini telah mempengaruhi juga alam pemikiran orang Manggarai. Hal ini terlihat dari sikap orang Manggarai yang juga sudah mengambil jarak terhadap alam sekitarnya dan berusaha memanfaatkannya untuk kesejahteraannya.

4.2.5.3 Pandangan Mengenai Alam

Sikap dan perilaku orang Manggarai terhadap alam di sekitarnya dapat memberikan gambaran pemikiran mereka tentang alam sekitarnya. Orang Manggarai selalu mengadakan ritus-ritus tertentu sebelum mengadakan kegiatan di dalam alam. Kebanyakan ritus itu berkaitan dengan seluruh proses pertanian yang mereka jalankan. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa orang Manggarai melihat alam sekitarnya sebagai sesuatu yang sakral yang harus dijaga dan dihormati. Kesakralan tersebut di samping karena mereka berkeyakinan bahwa alam semesta yang diciptakan oleh *Mori Keraéng* itu merupakan tempat diam roh-roh alam raya dan roh-roh para leluhur, tetapi terlebih lagi karena alam semesta bagi orang Manggarai merupakan sesuatu yang hidup atau setidaknya diresapi oleh daya yang menghidupkan.

Hal itu membawa kita kepada pemahaman bahwa orang Manggarai melihat alam semesta sebagai sesuatu yang hidup. Mereka memandang dunia atas (langit dan unsur-unsurnya) sebagai 'bapa' kehidupan yang selalu memberikan mereka cahaya matahari dan bulan serta bintang-bintang, yang selalu mencurahkan hujan, lambang daya hidup yang diberikan kepada bumi. Demikian juga orang Manggarai memandang bumi sebagai 'ibu' yang melahirkan segala yang ada di bawah dan di permukaannya, segala yang hidup. Ungkapan yang khas mengenai pandangan ini adalah *Ĕma (Ame) éta, Ine Wa (Bapa di atas, Ibu di bawah = langit di atas, bumi di bawah)*. Verheijen menjelaskan hal ini sebagai sebutan orang Manggarai bagi Wujud Tertinggi (Verheijen, 1991: 41-46). Dengan demikian, pandangan orang Manggarai mengenai alam semesta juga bersifat antropomorfistik. Unsur-unsur alam itu selalu berada dalam suatu hubungan yang harmoni, juga hubungan antara unsur-unsur alam itu dengan manusia dan antara alam dan manusia dengan dunia adikodrati. Alam, manusia dan dunia adirkodrati berada dalam suatu hubungan yang harmoni. Hubungan yang demikian diungkapkan melalui ritus-ritus tradisional yang menyatakan bahwa antara alam, manusia dan Yang Ilahi berada dalam suatu hubungan yang tak dapat dipisahkan satu sama lain.

Kesatuan hubungan manusia dengan alam diungkapkan dalam prinsip *gendang oné, lingko pe'an*. Hidup manusia tidak dapat dipisahkan dari alam raya di sekitarnya, artinya bergantung pada alam di sekitarnya. Karena itu perlu ada kekuasaan untuk mengatur (*gendang*) yang dinyatakan dalam pengaturan tanah

sebagai lahan pertanian (*lingko*). Jika harmoni itu terganggu karena sikap dan perilaku manusia maka segera dilakukan pemulihan melalui pemberian sanksi kepada yang melanggar dan melakukan ritus pemulihan. Ritus-ritus dimaksud antara lain: *teing hang ceki* (memberi makan kepada roh-roh nenek moyang), *penti* (syukur sesudah panen), *barong wae teku* (memberi makan kepada roh-roh yang ada di mata air), *takung naga golo* (memberikan makan kepada pelindung kampung), dan lain-lain (Mirsal, 2004: 27).

4.3 Dinamika Resistensi

4.3.1 Pendahuluan

Resistensi lokal merupakan isu menarik dalam konteks persoalan tambang di Manggarai. Resistensi mencirikan dinamika hubungan antara negara, korporasi dan komunitas lokal. Resistensi lokal menentukan posisi negara, korporasi dan komunitas lokal berkaitan dengan operasi tambang. Resistensi menggambarkan perubahan paradigma pembangunan lokal dan peta informasi yang dimiliki komunitas lokal seputar operasi tambang. Pola resistensi lokal semakin beragam terutama untuk memberikan tekanan dan kontrol langsung terhadap kebijakan operasi tambang.

Resistensi lokal mengandung 'kepercayaan' sosial bahwa kekuatan perubahan ada di tangan rakyat.⁵ Ini merujuk pada kelompok yang memiliki hubungan langsung dengan kepemilikan sumber daya alam (aset) pada tanah dan kawasan ulayat mereka tetapi tidak mendapatkan nilai ekonomis, sosial dan budaya yang mendukung keberlangsungan hidup mereka. Masyarakat lingkaran tambang merupakan pola yang dilakukan masyarakat lingkaran tambang dan elemen-elemen lokal untuk 'memaksa' negara mengubah mekanisme regulasi dan korporasi berkaitan dengan operasi tambang.

Resistensi lokal mencakup beberapa persoalan mendasar seperti kebijakan, operasi dan dampak-dampak langsung bagi masyarakat lingkaran tambang. Tujuan resistensi lokal juga mengacu pada pencapaian perubahan paradigma kebijakan

⁵Kekuatan perubahan di tangan rakyat dalam konteks tambang MLT (komunitas lokal) berhubungan secara erat dengan agenda perlawanan lokal terhadap mekanisme operasi ekonomi yang merugikan MLT (komunitas lokal). Lokal melawan operasi ekonomi dan modal dengan agenda dan kekuatan lokal. Lihat, Alan B. Durning. (1989). "Action at the Grassroots: Fighting Poverty and Environmental Decline," *Worldwatch Paper 88*. Washington DC: Worldwatch Institute.

tambang dan pola operasi yang dapat mempertimbangkan aspek 'lokal'. Resistensi menggambarkan hubungan elemen-elemen sosial lokal (stakeholder) sebagai prasyarat fundamental yang harus ada. Dengan demikian resistensi lokal dapat dikatakan sebagai mekanisme sosial yang kekuatan lokal bersama masyarakat lingkaran tambang berhadapan dengan dominasi negara dan korporasi.⁶

4.3.2 Sejarah Pertambangan di Manggarai

Sesungguhnya penyelidikan terhadap potensi pertambangan di Kabupaten Manggarai dan Manggarai secara keseluruhan telah dimulai sejak masuknya PT. Aneka Tambang (1980) untuk mengadakan penyelidikan potensi mineral di wilayah ini. Penyelidikan itu terus dilakukan hingga sekarang.

Hasil penyelidikan-penyelidikan selama ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Manggarai (termasuk Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Manggarai Timur) terdapat potensi bahan galian A, B dan C. Berikut ini gambaran umum tentang kronologi sejarah pertambangan di Kabupaten Manggarai (termasuk Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Manggarai Timur):

Tabel 4.1. Deskripsi Sejarah Pertambangan Manggarai⁷

TAHUN	LEMBAGA	KEGIATAN
1980	PT. Aneka Tambang	Penyelidikan umum dan Eksplorasi tambang Mangan
	PT. Nusa Lontar Mining dan PT. Flores Indah Mining (Billiton)	Eksplorasi bahan mineral
1993	Geological Research and Development Centre (Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi)	Pemetaan Geologis tentang segi empat Ruteng (<i>Geological Map of The Ruteng Quadrangle</i>)
	PT. Istindo Mitra Perdana	Studi Kelayakan Penambangan Mangan di Reo
1994	Direktorat Sumberdaya Mineral	Penyelidikan Pendahuluan Logam Besi dan Panduan

⁶Wawancara: I28, I29, I30, 20, 7 April 2009

⁷ Menurut Pemaparan hasil-hasil kegiatan lapangan dan non-lapangan tahun 2006 oleh Pusat Sumber Daya Geologi, ditemukan daerah-daerah bekas penambangan di Wancang, Kecamatan Cibai dan Bajak di Kecamatan Reok; bdk. Sukmana, Inventarisasi Mangan di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jakarta, 2006.

		Besi
1996-1997	Direktorat Sumberdaya Mineral	Eksplorasi Pendahuluan Bahan Galian Industri di daerah Kabupaten Manggarai
	Direktorat Sumber Daya Mineral Bandung	Pemetaan semi mikro terhadap 35 bahan galian golongan C
		Penggalian mangan di kampung Timbang
1998	PT. Flores Barat Mining (Singapura dan PT. Aneka Tambang)	Eksplorasi di wilayah Kontrak Karya Kabupaten Manggarai
2002	Direktorat Inventarisasi Sumber Daya Mineral, Bandung	Penyelidikan Geokimia Regional Lembar Ruteng Barat
2004	PT. Istindo Mitra Perdana.	Eksplorasi Mangan di Kecamatan Lambaleda
2005	PT. Sumber Jaya Asia	Eksplorasi mangan di Kecamatan Reok (Siwa & Wangkal-Kajong)

Hasil pemetaan dan penyelidikan geologi dan geokimia sejak tahun 1980 sampai dengan 2008 merekomendasikan sejumlah temuan mineral yang signifikan berikut ini:

1. Sejumlah daerah di Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat dan Manggarai Timur dijumpai beberapa tipe pemineralan. Di daerah gugusan pemineralan Pesi – Kalo – Nere terdapat tipe pemineralan tembaga (Cu) yang disertai dengan emas (Au). Gugusan pemineralan yang didominasi oleh emas (Au) terdapat di daerah Kuli, Watu Cie dan Sapo. Juga ditemukan sejumlah jenis mineral di gugusan pemineralan Bari, Musur, Rawul, Encuring (Ncuring, *red*) dan Wangkal.⁸

2. Keterdapatn endapan mangan di Kabupaten Manggarai (dan Manggarai Barat dan Manggarai Timur) di Kecamatan Reok, Cibal, Lambaleda dan Sambir Rampas. Endapan mangan yang ditemukan itu memiliki prospek yang sangat signifikan dengan 3 kategori, yaitu (1) endapan mangan yang sedang ditambang, (2) endapan mangan yang telah ditambang dan (3) endapan mangan yang masih merupakan tahap kegiatan eksplorasi. Daerah-daerah yang ditemukan sebaran mineralisasi mangan antara lain di Ponglalap, Rokot, Tumbak, Waso dan Merong,

⁸Agus Gurniwa, Penyelidikan Geokimia Bersistem Lembar Ruteng Barat, Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sub Direktorat Mineral Logam, 2005, <http://www.dim.esdm.go.id>, diakses 18 Maret 2009.

Kajong, Lante, Wangkal, Kubis, Meas, Kadung dan Ngampur. Khusus untuk endapan mangan di kampung Wangkal, cukup menarik karena persis di kampung. Demikian juga di Kampung Meas, endapan mangan dekat dengan kampung sehingga kampung harus dipindahkan manakala lokasi mangan di wilayah itu akan dieksploitasi.⁹

3. Endapan mineralisasi mangan yang dijumpai di Bukit Golo Rawang paling signifikan dan prospektif. Secara geologi sebarannya cukup luas. Dari puluhan lubang bor di Golo Rawang, endapan mangan primer terdapat di TP (Tempat Pemboran) 04, TP 09, TP 10, TP 11, TP 12, TP 13, TP 14. Luas sebaran I: 6000 m dengan ketebalan yang bisa diolah 6 meter dan berat jenis 4,5, menunjukkan total sumber daya: 81.000 ton mangan. Luas sebaran II: 10.000 meter dengan ketebalan yang bisa diolah 6 meter dan berat jenis 4,5 menghasilkan 135.000 ton mangan. Dengan kata lain, hasil total perhitungan sumber daya menunjukkan endapan mangan di wilayah ini berkisar antara 81.000 ton hingga 135.000 ton, dengan ketebalan hingga 6 meter.¹⁰

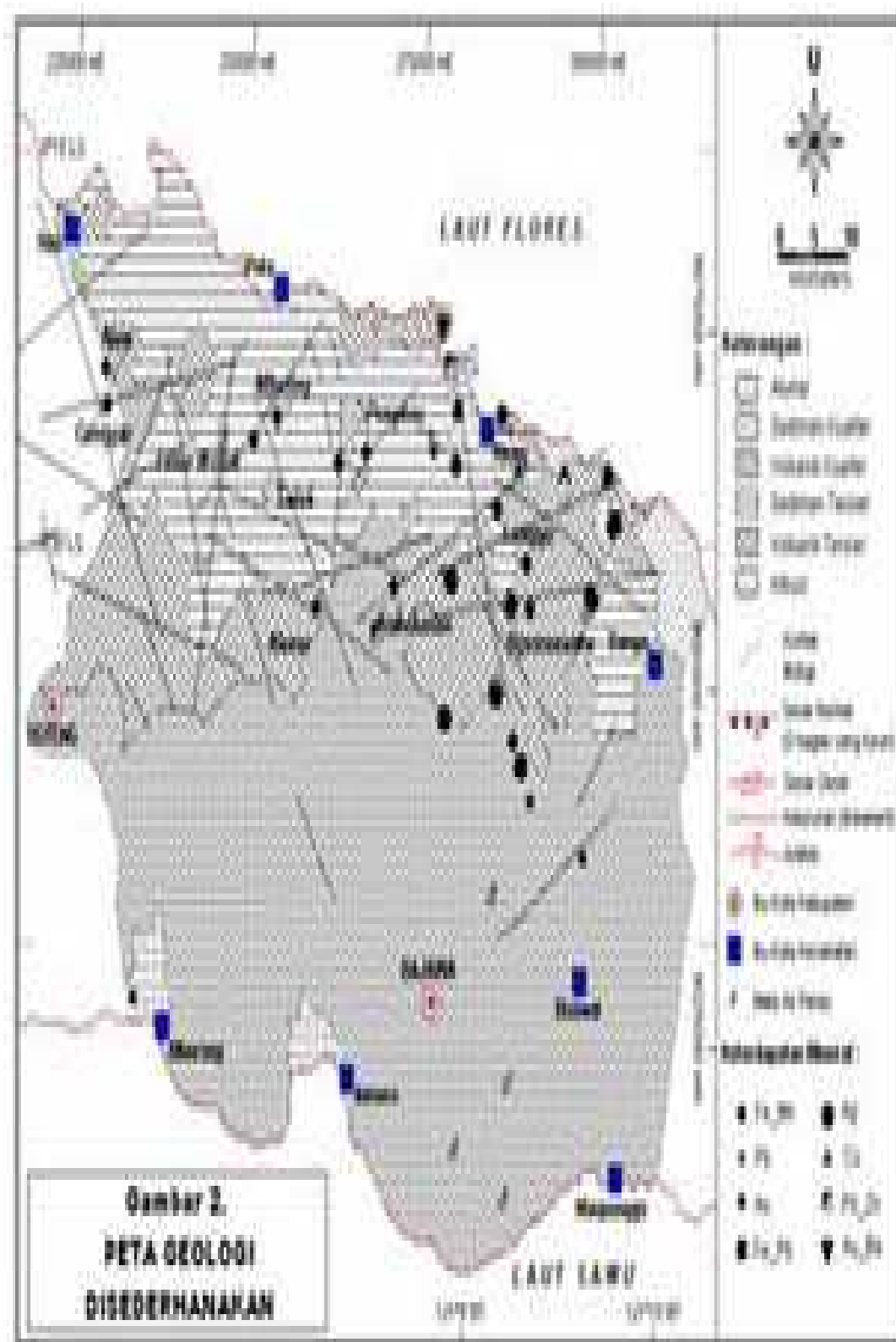
Sepanjang dua (2) tahun terakhir ada peningkatan kegiatan berkaitan pertambangan terutama penyelidikan umum dan eksplorasi. Pemerintah cenderung memberikan kesempatan yang besar kepada korporasi tambang untuk melakukan penyelidikan umum dan eksplorasi di Manggarai.¹¹

Gambar 4.2. Peta Sebaran Mangan dan Mineral Manggarai

⁹ Sukmana (Kelompok Program Penelitian Mineral), Inventarisasi Mangan di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pusat Sumber Daya Geologi, 2006, <http://www.dim.esdm.go.id>, diakses 18 Maret 2008.

¹⁰ Sukmana (Kelompok Program Penelitian Mineral), Eksplorasi Umum Endapan Mangan di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pusat Sumber Daya Geologi, 2007, <http://www.dim.esdm.go.id>, diakses 18 Maret 2009.

¹¹ Penulis menemukan kenyataan di lapangan bahwa korporasi menggunakan kesempatan penyelidikan umum untuk melakukan eksploitasi mangan. Hal ini yang menyebabkan munculnya resistensi yang kuat dari masyarakat lingkaran tambang dan elemen-elemen lokal lainnya.



4.3.3 Otonomi Daerah

Pemberlakuan UU Otonomi Daerah No. 22 tahun 1999, lalu direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 tahun 2004 memberikan ruang dan peluang besar kepada pemerintah kabupaten untuk mengembangkan potensi yang ada di daerah dan dapat mengolah sumber daya alam demi kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Sekarang ekspansi korporasi tambang sedang merambah ke daerah-daerah, termasuk di Manggarai. Begitu banyak izin Kuasa Pertambangan diberikan kepada korporasi-korporasi, tanpa memperhatikan berbagai persyaratan dan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Masyarakat terancam akan tergusur terutama berkaitan dengan lahan-lahan pertanian yang dialihfungsikan menjadi kawasan tambang.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai menilai investasi pertambangan khususnya galian B menjadi salah satu sektor yang perlu dieksploitasi. Investasi pertambangan bahan galian B khususnya Mangan menjadi investasi terbesar yang sedang digalakkan oleh Pemkab Manggarai. Kebijakan investasi ini dirumuskan dan dilakukan bersama dinas terkait seperti Dinas Pertambangan, Dinas Kehutanan dan Badan Pengendali Dampak Lingkungan.¹²

Kurang lebih selama kurun waktu 3 tahun, 2004 – 2007, Pemerintah Kabupaten Manggarai resmi mengeluarkan perijinan Kuasa Pertambangan (KP) kepada 11 perusahaan untuk melakukan aktivitas pertambangan di 20 wilayah prospek pertambangan mangan, logam dasar dan emas.¹³

¹²Kebijakan Pemkab Manggarai dalam bidang pertambangan terungkap dalam Seminar sehari tanggal 18 Desember 2008 di Ruteng, yang disampaikan Kepada Dinas Pertambangan Manggarai, Bpk. Maksimus Ngkeros.

¹³Pemberian izin KP ini bisa dianggap masif karena tidak memperhitungkan kapasitas multi aspek daerah Manggarai terutama berkaitan dengan kesiapan sosial, budaya dan peta ekologi. *Wawancara*, I7, I8,I9,I10 (Maret – April 2009 di Reo dan Ruteng, Manggarai, NTT)

Tabel 4.2. Izin KP 2004 - 2007

NO	LEMBAGA	JENIS KP	LOKASI PENAMBANGAN	JENIS	LUAS (HA)
1.	PT. Istindo Mitra Perdana	Eksplorasi HK/116/04	Kecamatan Lambaleda	Mangan	736.30
2.	PT. sumber Jaya Asia	KP Eksploitasi HK/168/05	Kecamatan Reok (Siwa & Wangkal-Kajong)	Mangan	667,9
3.	PT. sumber Jaya Asia	KP Eksploitasi HK/28/06	Kecamatan Reok (Siwa & Wangkal-Kajong)	Mangan	194,4
4.	PT. Agra Artha Mineral	KP Eksplorasi HK/29/06	Kecamatan Lambaleda	Mangan	6.205
5.	PT. Lisindo Sentosa	KP Eksplorasi HK/31/06	Kecamatan Reok (desa Bajak, Nngorang, dan sekitarnya)	Mangan	3.963
6.	PT. Tribina Sempurna	KP Penyelidikan Umum HK/2/2007	Kecamatan Reok (Soga dan Bone Wangka)	Mangan	1.086
7.	PT. Alaska Dwipa Perdana	KP Penyelidikan Umum HK/3/2007	Kecamatan Lambaleda (Rawang-Tengku Lawar)	Mangan	688,25
8.	PT. Alaska Dwipa Perdana	KP Penyelidikan Umum HK/13/2007	Kecamatan Lambaleda (Rawang-Tengku Lawar)	Mangan	623,50
9.	PT. Alaska Dwipa Perdana	KP Penyelidikan Umum HK/3A/2007	Kecamatan Lambaleda (Desa Bea Mese)	Mangan	529,25
10.	PT. Tribina Sempurna	KP Eksplorasi HK/48/2007	Kecamatan Reok, Wae Dara, Desa Kajong	Logam Dasar	7.549
11.	PT. Indomineral	KP Peny. Umum HK/49/2007	Kecamatan Reok	Logam Dasar	15.550

Dari kronologi tambang bisa terbaca bahwa Pemerintah Kabupaten Manggarai banyak menerbitkan KP di tahun 2007. Kebijakan Pemkab di bidang pertambangan menunjukkan sebuah pergeseran komitmen dari “peningkatan kualitas lingkungan” ke “penurunan kualitas lingkungan”. Bagaimana pun juga keputusan ini sangat erat pengaruhnya dengan keutuhan lingkungan hidup Manggarai, yang dipelihara secara baik selama bertahun-tahun.

4.3.4 Komunitas Lokal

Berdasarkan investigasi di lapangan, pemahaman masyarakat lingkaran tambang atau masyarakat yang tanahnya dijual atau diserahkan untuk kepentingan industri pertambangan sangat minim. Bagaimana proses masuk korporasi tambang, apa yang harus dilakukan masyarakat, apa tanggung jawab perusahaan, sama sekali tidak dipahami oleh masyarakat.¹⁴

Namun tidak berarti masyarakat tidak mengerti tentang dampak pertambangan bagi kehidupan mereka saat ini dan terlebih bagi generasi yang akan datang. Masyarakat kecil sesungguhnya tidak mau menyerahkan dan menjual tanah mereka untuk dijadikan industri pertambangan karena mengingat generasi berikutnya yang membutuhkan tanah, kebun sebagai sumber kehidupan mereka. Menjual tanah berarti mereka menjual kehidupan dan masa depan kehidupan generasi masa depan dan membiarkan generasi berikutnya hidup dalam penderitaan dan kemiskinan. Sebaliknya mereka berusaha memperjuangkan dan mempertahankan tanah dan kawasan ulayat mereka terhadap operasi korporasi tambang.¹⁵

Masyarakat lingkaran tambang pun tahu bahwa industri pertambangan akan membawa dampak pada kerusakan sumber-sumber kehidupan mereka: hutan, tanah dan sumber air mereka. Dan karena itu mereka tegas menolak kehadiran tambang di wilayah mereka. Penulis menemukan di lapangan bahwa kekuatiran masyarakat lingkaran tambang ini pernah mereka sampaikan kepada pihak pemerintah lewat surat. Namun, negara (pemkab) tidak memberikan tanggapan atas keluhan mereka.¹⁶

Masyarakat juga menyadari bahwa industri pertambangan tidak bertahan lama dan tidak memberikan jaminan masa depan untuk anak cucu mereka karena efeknya yang merusak dan menghancurkan lingkungan. Masyarakat justru menyadari bahwa pertanian, nelayan merupakan pekerjaan yang memberi masa depan walaupun

¹⁴Pengetahuan masyarakat lingkaran tambang berkaitan dengan operasi tambang di Manggarai mulai berkembang dua tahun terakhir. Kehadiran korporasi tambang dua dekade sebelumnya tidak menjadi bagian dari perhatian masyarakat lokal. Pemkab dan korporasi juga tidak pernah menjelaskan secara lengkap semua hal berhubungan dengan operasi tambang. Wawancara: I1,I2,I3, I8,I9, I10, I14, I16,I18 (Maret – April 2009 di Reo, Manggarai).

¹⁵Masyarakat Manggarai memiliki ungkapan budaya yang menjadi simbol kedaulatan atas tanah dan kawasan, *Émé manga ata kudut rampas tana purak mukang wajo kampong, Ro'éng Manggarai pulung kudut ta'ang lawa mata agu mosé (Jika ada orang yang ingin merampas tanah air dan kampung halaman, Orang Manggarai melawannya sampai titik darah penghabisan, mati atau hidup)*. Wawancara dengan I30, 5 April 2009 di Ruteng

¹⁶Wawancara, I1,I2,I3, I4, I15,I22,I27 (Maret – April 2009 di Lingkaran Tambang Reo Manggarai)

hasilnya tidak selalu mencukupi kebutuhan hidup mereka.¹⁷ Dari tanggapan-tanggapan masyarakat ini menjadi jelas bahwa klaim Pemerintah dan Perusahaan bahwa masyarakat menerima kehadiran pertambangan tidak seluruhnya benar.

4.3.5 Stakeholder Lokal

Dinamika persoalan lokal secara eksplisit menunjukkan kehadiran beberapa aktor penting yang membentuk pola resistensi lokal. Mereka membina kemampuan rakyat untuk melahirkan satu kekuatan lain menghadapi negara dan korporasi. Elemen-elemen ini berusaha memperbesar tindakan-tindakan lokal untuk menahan ekspansi korporasi dan perluasan regulasi negara yang tidak menjamin keadilan untuk komunitas lokal.

Biasanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi pertemuan-pertemuan di tingkat kampung maupun desa. Mereka memperkenalkan praktek-praktek keterlibatan rakyat dalam menyusun kebijakan publik yang memberikan ruang bagi aspek-aspek lokal. Yang dipentingkan dalam bagian ini adalah kekuatan lokal yang diandalkan sebagai basis resistensi lokal. Apa yang dilakukan elemen-elemen ini sebagai stakeholder komunitas lokal dalam menyusun strategi resistensi lokal adalah memperbesar 'empowerment'¹⁸ kepada penduduk desa¹⁹. Hal ini merujuk pada pola dorongan yang dapat diberikan elemen-elemen lokal kepada rakyat untuk menumbuhkan kesadaran kritis terhadap pola dan mekanisme pembangunan lokal.

Secara perlahan, pengalaman yang mereka peroleh mendorong mereka mempertanyakan kesahihan kegiatan-kegiatan yang ditunjukkan korporasi maupun negara. Kegiatan-kegiatan ini pada mulanya dianggap mampu memberikan implikasi positif bagi masyarakat desa (lingkar tambang) namun sesungguhnya apa yang dilakukan korporasi dan negara jauh dari tujuan kemakmuran dan kesejahteraan.

Mereka melihat perlunya pendekatan yang lebih memiliki karakter 'lokal' terutama memperhatikan kebutuhan lokal. Hal ini juga berkaitan dengan bagaimana

¹⁷Wawancara I1, I2, I7, I8, I9, I10 (25 – 28 Maret 2009, MLT di Reo Manggarai)

¹⁸Upaya-upaya ini menekankan tindakan swadaya yang konstruktif. Meskipun ada dorongan yang diberikan kepada masyarakat lokal namun hal ini tidak meniadakan kekuatan internal komunitas lokal berupa keswadayaan multi aspek yang dapat ditunjukkan. Lihat, Rajesh Tandon (1989)., "The State and Voluntary Agencies in Asia," dalam Richard Holloway (ed.). *Doing Development: Government, NGOs and The Rural Poor in Asia*. London: Earthscan Publication Ltd, pp.12-19

¹⁹Penduduk desa merujuk pada keseluruhan keberadaan dan dinamika multi aspek masyarakat lingkaran tambang.

korporasi dan negara mempertanggungjawabkan dampak-dampak untuk komunitas lokal dari investasi dan regulasi yang ada. Melalui pendampingan elemen-elemen ini maka komunitas lokal mampu menanggapi kebutuhan untuk menemukan langkah-langkah yang tetap dari keseluruhan investasi dan operasi korporasi.

Studi lapangan yang dilakukan peneliti menemukan bahwa resistensi lokal di Manggarai memunculkan beberapa elemen lain di samping negara, korporasi, Masyarakat Lokal. Kehadiran elemen-elemen ini sangat menentukan dinamika resistensi lokal dan perubahan hubungan antara tiga elemen sebelumnya.

Ada tiga elemen kunci yang membentuk dan menentukan dinamika resistensi lokal dalam konteks operasi tambang di Manggarai. *Pertama*, kelompok NGO²⁰ yang memusatkan perhatian pada proses advokasi masyarakat lingkaran tambang yang paling merasakan akibat langsung dari pola dan mekanisme operasi tambang di daerah ini. NGO-NGO ini bergerak di level masyarakat dan memusatkan perhatian pada pembentukan gerakan rakyat untuk melakukan resistensi terhadap kebijakan dan operasi tambang.

Kelompok NGO ini bergerak dengan satu pemahaman bahwa kelambanan lokal mempengaruhi mereka dalam menghadapi eskalasi operasi dan perluasan regulasi investasi tambang. Amat mudah untuk dibuktikan bahwa posisi komunitas lokal sangat ditentukan oleh keseluruhan informasi yang mereka peroleh berkaitan dengan persoalan tambang di kawasan ini. Mereka mengasumsikan bahwa percepatan informasi dan pengetahuan akan menentukan seberapa besar volume resistensi yang dapat diberikan dan ditunjukkan masyarakat lingkaran tambang terhadap korporasi dan negara.

Kedua, media massa lokal²¹ menjadi salah satu elemen lokal yang memberikan pengaruh kuat pada pembentukan resistensi lokal. Pemberitaan media massa lokal menjadi salah satu titik penting untuk mengukur dan menggambarkan dinamika resistensi lokal. Penguasaan informasi dan diskusi publik menentukan

²⁰Wawancara dengan RM (27 April 2009), Direktur LSM Bina Desa Mandiri, yang memberikan pendampingan bagi masyarakat lingkaran tambang terutama dalam proses penyadaran akan hak-hak sosial, ekonomi dan budaya.

²¹Flores Pos yang terbit di Ende, Flores dan Koran Pos Kupang yang terbit di Kupang adalah dua harian yang selalu memberikan ruang pemberitaan yang cukup luas dan signifikan seputar persoalan tambang di Manggarai.

posisi penting media massa lokal dalam membahasakan kebutuhan lokal, korporasi dan posisi negara.

Sepanjang tahun 2006 – 2009, media massa lokal telah menunjukkan peran penting dalam mendiskusikan persoalan-persoalan penting berkaitan dengan posisi masyarakat lingkaran tambang. Pengungkapan persoalan tambang dilakukan dengan luas oleh media massa lokal.

Ketiga, dari studi lapangan penulis menemukan bahwa Gereja Katolik merupakan elemen paling penting dalam konteks dinamika hubungan tripolar. Institusi Gereja, melalui Komisi JPIC, menentukan dinamika relasi dan prospek resistensi lokal. Gereja menempati posisi sosial yang menentukan kehidupan sosial, politik dan budaya lokal. Komisi JPIC menerbitkan analisis komprehensif tentang industri tambang dan membuka ruang-ruang diskusi yang lebih kritis seputar persoalan ini. Komisi JPIC melakukan pendekatan yang lebih intens dengan masyarakat lingkaran tambang dan memberikan pertimbangan kritis atas kebijakan industri tambang yang dikeluarkan pemerintah dan dilaksanakan korporasi.²²

4.3.6 Lingkup Resistensi

Resistensi lokal mencakup beberapa aspek utama berkaitan dengan praktek tambang di Manggarai. Cakupan ini berhubungan dengan tujuan yang akan dicapai melalui resistensi yang dibangun komunitas lokal. Resistensi lokal terutama berkaitan dengan transformasi dua persoalan utama. **Pertama**, persoalan makro merujuk pada pola kebijakan publik yang diterapkan negara dalam memberikan basis regulasi kepada Kuasa Pertambangan (KP) untuk melakukan tahapan-tahapan seperti penyelidikan umum, eksplorasi, dan eksploitasi. **Kedua**, persoalan mikro berkaitan dengan dampak-dampak sosial, budaya, dan ekonomi operasi tambang terhadap kehidupan masyarakat lingkaran tambang.

²²JPIC adalah Komisi Justice, Peace and Integrity of Creation atau Komisi Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan. JPIC adalah Komisi resmi yang ada dalam Institusi Gereja Lokal Keuskupan Ruteng. Juga, ada pada tarekat-tarekat religius dan biara-biara. Keberadaan komisi JPIC adalah sah. Komisi JPIC legal. Sesuai dengan namanya, komisi ini berperan penting dalam karya-karya pastoral yang berkaitan dengan pembelaan keadilan, perdamaian dan utuhnya ciptaan. Dalam konteks tambang, Komisi JPIC wajib mengingatkan siapapun akan bahaya pengingkaran keadilan, penghancuran perdamaian, dan perusakan lingkungan hidup sebagai satu keutuhan. Komisi JPIC memberikan pertimbangan kritis terhadap mekanisme pembangunan di tingkat lokal.

Pemberian izin KP merupakan problematika menarik dalam hubungannya dengan pertambangan. Keseluruhan kebijakan negara menggambarkan relasi asimetris antara negara, korporasi dan komunitas lokal. Perhatian utama ditujukan kepada proses pemberian KP kepada korporasi yang membuka investasi di daerah ini. Kasus operasi tambang di Manggarai menunjukkan bahwa izin KP hanya sebatas urusan negara dan korporasi. Posisi komunitas lokal, dalam konteks ini masyarakat lingkar tambang, tidak memiliki posisi signifikan untuk memberikan masukan proporsional pada satu regulasi.

Tahap-tahap utama berkaitan dengan operasi tambang di kawasan ini hanya melibatkan negara sebagai pihak pemberi legalitas dan korporasi sebagai pihak lain di lapangan. Bahkan masyarakat lingkar tambang seringkali tidak mengetahui identitas KP. Resistensi mencakup persoalan regulasi, operasi tambang dan dampak bagi masyarakat lingkar tambang.

4.3.6.1 Regulasi

Regulasi (izin KP)²³ merupakan salah satu persoalan paling menonjol dalam persoalan tambang di Manggarai. Regulasi ini berada dalam ruang kewenangan negara. Studi lapangan yang dilakukan penulis menegaskan bahwa masyarakat lingkar tambang membutuhkan regulasi atau izin KP yang mengandung aspek-aspek lokal. Aspek-aspek lokal ini berkaitan dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi yang harus dilindungi negara dalam konteks eksploitasi SDA. Prinsip keberlangsungan masyarakat lingkar tambang harus menjadi perhatian izin KP yang diberikan negara kepada korporasi. Hal ini penting untuk ditekankan karena regulasi seharusnya menggambarkan dinamika hubungan yang adil antara negara, korporasi dan komunitas lokal. Ada pengalaman masyarakat lingkar tambang yang menunjukkan bahwa izin KP menjadi simbol dominasi negara dan korporasi. Izin eksploitasi PT SJA dan PT ABM diberikan tanpa memperhitungkan kepentingan masyarakat lingkar tambang.²⁴

²³Regulasi berada dalam jangkauan wewenang negara berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dalam bidang pertambangan. Regulasi menjadi bagian dari fokus resistensi lokal terutama berkaitan dengan mekanisme dan proses regulasi yang tidak memberikan perhatian pada aspek-aspek lokal.

²⁴Dokumen SK Bupati Manggarai NTT hingga 2012 berdasarkan SK Bupati No: HK/287/2007, 5/10/2007 dari PT Tribina Sempurna kepada PT SJA, Wawancara: I6,I8.I9.I10 (27 April 2009).

4.3.6.2. Operasi²⁵

Operasi korporasi merupakan masalah lain yang dihadapi MLT. Aspek operasi korporasi mencakup landasan juridis-formal perusahaan untuk melakukan dan menjalankan tahap-tahap yang harus dilewati industri tambang. Operasi menjadi satu persoalan ketika tahap-tahap ini tidak dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek lokal. Kondisi MLT tidak diperhatikan pada saat korporasi menjalankan operasinya. Operasi korporasi ini berkaitan dengan luasnya areal operasi dan tahap-tahap yang harus dilewati korporasi dalam menjalankan semuanya itu. Ada kenyataan bahwa korporasi melakukan operasi dengan jangkauan areal operasi di luar batas-batas haknya menurut izin KP yang mereka peroleh dari pemerintah.

4.3.6.3 Dampak

Operasi industri tambang memunculkan banyak dampak yang tidak mengutungkan MLT. Dampak-dampak secara langsung dihadapi MLT. Korporasi mendapatkan apa yang mereka inginkan sebagai orientasi tunggalnya sementara MLT menghadapi dampak-dampak itu secara langsung. Terutama berkaitan dengan kerusakan lingkungan, sosial budaya dan kemiskinan yang menjadi ciri paling nyata dari MLT. Korporasi yang mendapatkan keuntungan dari eksploitasi Mangan di kawasan ini menyebabkan masyarakat lokal menghadapi dampak-dampak negatif secara langsung.

Deskripsi singkat berikut ini menunjukkan aspek-aspek penting berkaitan dengan resistensi lokal. Dari studi yang dilakukan penulis ditemukan tiga persoalan pokok yang menjadi perhatian elemen-elemen lokal dalam kerangka resistensi lokal. Aspek-aspek ini bentuk resistensi yang dibangun komunitas lokal. Aspek regulasi dan operasi berkaitan dengan dominasi negara dan korporasi. Aspek dampak multi dimensi merupakan akibat operasi tambang yang dialami masyarakat lingkaran tambang secara langsung.

²⁵Korporasi tidak memperhatikan tahap-tahap operasi mulai dari penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi. Setiap tahap harus memiliki izin sebelum korporasi melakukan operasi di areal yang sudah disetujui.

Tabel 4.3. Lingkup Resistensi Lokal

Aspek	Deskripsi	Fokus
Regulasi	Berkaitan dengan izin KP yang diberikan negara kepada korporasi.	Izin KP yang tidak memperhatikan aspek 'lokal' (Daerah). Ini merujuk pada aspek budaya, kebutuhan ekonomi, kultur pertanian. Kekhasan lokal yang harus dipertahankan keberlangsungannya. Dalam kerangka ini adalah komunitas lokal (MLT)
Operasi	Pola operasi, areal, mekanisme operasi korporasi tambang	Kedaulatan lokal atas kawasan, hutan dan lahan/tanah
Dampak	Akibat-akibat yang ditimbulkan operasi tambang	Kerusakan tanah, menurunnya curah hujan, berkurangnya debit air minum, kerusakan ekosistem

Fokus dari lingkup resistensi ini berkaitan dengan 'kedaulatan' lokal atas kawasan dan mekanisme regulasi yang harus diberikan negara kepada korporasi. Aspek lokal tidak hanya berkaitan dengan sumber daya alam melainkan kebutuhan-kebutuhan lokal

4.3.7 Bentuk Resistensi

4.3.7.1 Rapat Umum

Pembangunan²⁶ memerlukan partisipasi dan peran masyarakat sipil secara lebih signifikan. Partisipasi menekankan pengertian bahwa keterlibatan masyarakat secara komprehensif. Keterlibatan masyarakat tidak hanya sebatas pendapat-pendapat publik melainkan juga kebutuhan-kebutuhan publik. Proses penentuan kebijakan pembangunan menggambarkan peran masyarakat.

Masyarakat lokal menemukan kesadaran baru berkaitan dengan bencana ekologis sebagai ancaman nyata bagi lingkungan hidup sebagai ancaman nyata

²⁶ Ada banyak deskripsi tentang pembangunan, juga berkaitan dengan pendekatan dan praksis pembangunan. Pembangunan berkaitan dengan mekanisme dan 'policy' yang melibatkan otoritas, modal dan implementasi. Operasi korporasi terutama dengan peranan modal merupakan salah satu agenda pembangunan.

keberlangsungan hidup.²⁷ Kesadaran ini berkembang dalam proses yang panjang melalui konsolidasi internal dengan bantuan stakeholder utama²⁸ komunitas lokal. Yang dibicarakan dalam konteks ini adalah implikasi pembangunan lokal secara luas dan akibat destruktif operasi tambang yang memojokkan posisi masyarakat lingkaran tambang.

Penulis menemukan pola umum yang dilakukan masyarakat lingkaran tambang berhadapan dengan operasi tambang. Masyarakat lingkaran tambang melakukan rapat umum sebagai salah satu bentuk resistensi lokal terhadap operasi tambang baik yang dilakukan PT SJA dan PT ABM maupun korporasi yang baru mendapatkan izin dari negara.

Rapat umum biasanya dilakukan masyarakat lingkaran tambang sebagai satu kesatuan adat dan budaya. Suatu komunitas adat yang memiliki hak ulayat atas tanah dan kawasan tambang. Salah satu simbol paling penting dari kesatuan adat dan budaya ini adalah kedudukan penting rumah adat (*mbaru gendang*) dalam setiap rapat umum yang dilakukan masyarakat lingkaran tambang.

Rapat umum yang dilakukan MLT menghasilkan kekuatan untuk menempatkan posisinya secara seimbang berhadapan dengan korporasi dan negara. Biasanya rapat umum (*mbaru gendang*) diadakan untuk membicarakan kehidupan mereka (*lingko*) atau tanah kehidupan. Kegiatan ini merupakan satu alat yang disediakan adat untuk mempertahankan hak-hak mereka. Rapat umum di rumah adat memiliki ikatan hukum yang mengikat semua warga dalam komunitas adat bersangkutan.

Kedudukan rumah adat menjadi sangat penting bukan saja dari aspek adat dan budaya melainkan berhubungan dengan keberadaan masyarakat adat

²⁷ Kehancuran ekologis memicu kesadaran baru dalam diri masyarakat lokal berkaitan dengan pola operasi korporasi. Lihat, Robert Ornstein & Paul Ehrlich.(1989). *New World, New Mind: Moving Toward Conscious Evolution*, New York: Doubleday

²⁸ Gereja (JPIC) membentuk forum-forum pastoral untuk membahas persoalan-persoalan penting berkaitan dengan kebijakan dan operasi tambang. Gereja memberikan pendampingan kepada MLT berhubungan dengan kesadaran akan hak-hak mereka dalam urusan tambang. Gereja Katolik Keuskupan Ruteng mengeluarkan sebuah Nota Pastoral berkaitan dengan kebijakan pembangunan di tingkat lokal Manggarai yang sedang menjadikan pertambangan sebagai salah satu bagian implementasinya. Gereja Katolik dalam Nota Pastoral itu mengingatkan Pemerintah untuk menerapkan pola pembangunan yang tetap mendukung keberlangsungan kehidupan lingkungan dan manusia. Nota Pastoral ini merupakan kesepakatan Gereja Katolik Keuskupan Ruteng dalam Sidang Pastoral yang diadakan pada tanggal 21 – 24 April 2009.

bersangkutan. Semua keputusan bersama yang disepakati dalam rapat adat memiliki kekuatan untuk mengikat semua anggota komunitas adat.

Sebagai simbol kesatuan maka rumah adat dan semua rapat umum yang dilakukan komunitas adat di dalamnya selalu mengacu pada aspek 'kedaulatan' lokal atas kawasan dan tanah. Rapat umum memutuskan sikap dan pilihan tindakan masyarakat lingkaran tambang berkaitan dengan kehadiran industri tambang dengan semua dampak yang ditimbulkannya. Rapat umum menjadi bentuk resistensi lokal terhadap kehadiran operasi tambang.

Hal ini menjadi bagian dari resistensi yang dibangun masyarakat lingkaran tambang sepanjang dua tahun terakhir (2007 – 2009). Penulis menemukan kenyataan bahwa rapat umum dalam rumah adat menjadi bagian penting bagi masyarakat lingkaran tambang untuk merumuskan resistensi terhadap operasi tambang.²⁹

Penulis menemukan dinamika yang menegaskan pentingnya rapat umum bagi masyarakat lingkaran tambang. Dalam rapat umum, masyarakat lingkaran tambang dapat membicarakan semua persoalan berkaitan dengan operasi tambang.³⁰ Rapat umum dijadikan sebagai pijakan penting pembentukan resistensi lokal yang kuat. Sebagaimana regulasi memberikan pendasaran pada operasi tambang, rapat umum memberikan justifikasi sosial terhadap resistensi lokal.³¹

Dalam proses di tingkat lokal, rapat umum memperkuat kebersamaan dan pemahaman yang sama atas operasi tambang di Manggarai. Selain, resistensi terhadap PT SJA dan PT ABM, rapat umum menjadi bagian dari resistensi lokal terhadap korporasi-korporasi yang mendapat izin KP dari negara. Rapat umum menjadi mekanisme penting terbentuknya resistensi lokal.

Studi yang dilakukan penulis di kawasan Manggarai menunjukkan satu pola yang umum bahwa perlawanan lokal harus mengidentifikasikan proses dengan keberadaan rapat umum. Rapat umum merupakan simbol kekuatan, kebersamaan dan kesatuan komunitas lokal untuk menghadapi pola-pola penghancuran sosial. Resistensi lokal muncul dari rangkaian rapat umum yang dilakukan masyarakat

²⁹Terungkap dari wawancara dengan pemuka masyarakat lingkaran tambang, aktivis NGO lokal dan para hirarki Institusi Gereja (Maret – April 2009)

³⁰Sikap dan pandangan mereka berhubungan dengan industri tambang di Manggarai. MLT melakukan rapat umum sejak tahun 2007 dengan bantuan pendampingan elemen-elemen lokal terutama NGO dan institusi agama (Gereja Katolik).

³¹Wawancara dengan KM (28/3/2009), seorang pemuka masyarakat adat Satar Teu yang berada dalam kawasan operasi PT ABM

lingkar tambang. Kenyataan yang penting adalah bahwa intensitas kehadiran elemen-elemen lokal seperti NGO dan institusi agama ini menentukan keberhasilan resistensi lokal yang teridentifikasi dalam kegiatan rapat umum warga dalam rumah adat.³²

4.3.7.2 Diplomasi Penduduk³³

Diplomasi penduduk berhubungan dengan penguatan ikatan sosial dan hubungan antar rakyat dalam satu komunitas adat-budaya. Kesatuan adat ini menjadi salah satu kekuatan yang mencirikan resistensi lokal terhadap metode pembangunan yang eksploitatif dan destruktif. Diplomasi penduduk menjadi salah satu keperluan dasar untuk resistensi lokal. Diplomasi penduduk menjadi salah bentuk resistensi lokal. Diplomasi penduduk merupakan urusan internal komunitas adat untuk menjaga kesatuan dan kebersamaan internal dan pengaturan urusan ini tidak diserahkan kepada pemerintah.

Penduduk dalam jumlah dan frekuensi yang terus meningkat mengambil kesimpulan bahwa hubungan antar rakyat menjadi urusan internal komunitas lokal. Hal ini tidak lagi menjadi urusan negara yang seringkali memisahkan kebijakan dan regulasi dari nilai dan aspirasi warga.³⁴ Masyarakat lingkaran tambang menjalin hubungan antar elemen untuk menciptakan ruang komunikasi di antara mereka sendiri.

Diplomasi penduduk biasanya dibangun di antara kelompok kecil dengan bantuan para pemimpin adat yang memiliki otoritas adat. Diplomasi yang dilakukan masyarakat lingkaran tambang biasanya menjadi forum untuk memperluas informasi, pengertian dan pemahaman yang semakin lengkap tentang tambang. Diplomasi penduduk dalam ruang masyarakat lingkaran tambang menjadi bagian dari resistensi yang dibangun berhadapan dengan operasi tambang.

³²Rumah adat (mbaru gendang) merupakan representasi kedaulatan MLT atas kawasan dan sumber daya alam yang tercakup di dalamnya. Rumah adat merupakan simbol kebersamaan untuk melahirkan perlawanan terhadap setiap hal yang mengancam keberlangsungan hidup seluruharganya.

³³Diplomasi penduduk berhubungan dengan penguatan ikatan sosial dan hubungan antar rakyat dalam satu komunitas adat-budaya. Kesatuan adat ini menjadi salah satu kekuatan yang mencirikan perlawanan lokal. Diplomasi penduduk menjadi salah satu kebutuhan dasar untuk perlawanan dan diplomasi ini sendiri sudah menjadi satu bentuk resistensi lokal. Diplomasi penduduk merupakan urusan internal komunitas adat yang tidak diserahkan kepada pemerintah untuk mengaturnya. Lihat, Don Carlson & Craig Comstock (eds.).(1986). *Citizen Summitry: Keeping the Peace when it Matters Too Much to be left to Politicians*. New York: St. Martin's Press

³⁴Wawancara I6, I8,I9, I10 (Maret – April 2009)

Diplomasi penduduk bergerak dalam satu simpul yang dibangun 'stakeholder' di tingkat lokal.³⁵ Diplomasi penduduk menyusun perspektif yang sama berkaitan dengan industri tambang. Konsolidasi internal ini berguna untuk membaca jangkauan pengetahuan masyarakat lingkaran tambang tentang tambang. Studi lapangan menguatkan kenyataan bahwa diplomasi penduduk menjadi bagian dari pertahanan diri lokal terhadap dominasi korporasi dan negara dalam bentuk eksploitasi sumber daya alam dari bagian kawasan yang menjadi hak ulayat warga. Diplomasi penduduk memperkuat rantai hubungan internal komunitas lokal untuk mendesak peninjauan kembali atas regulasi yang diberikan negara kepada korporasi.³⁶

Diplomasi penduduk sebagai bagian dari resistensi lokal mendesak negara dan regulasi untuk mengembangkan kebijakan pembangunan yang mempertahankan hubungan simetris dengan masyarakat lingkaran tambang. Dari studi lapangan ditemukan bahwa di antara kemajuan paling penting yang dihasilkan kekuatan rakyat dalam diplomasi penduduk adalah membangun resistensi rakyat terhadap operasi tambang di Manggarai. Resistensi (lokal) menjadi mekanisme sosial yang dibangun masyarakat lingkaran tambang untuk menghadapi dominasi negara dan korporasi.³⁷

4.3.7.3 Publikasi³⁸

Resistensi lokal yang dilakukan masyarakat lokal juga berkaitan dengan usaha mengendalikan ruang publik dengan informasi yang semakin luas dan lengkap tentang tambang. Pola ini yang kemudian menyebabkan persoalan tambang menjadi bagian dari perhatian publik secara luas. Ada pertukaran informasi antar elemen-elemen lokal terutama berkaitan dengan ketimpangan hubungan antara masyarakat lokal, negara dan korporasi tambang. Dengan ini publik dapat menangkap gejala

³⁵ Komisi JPIC bergerak sebagai salah satu simpul penting yang diperhitungkan dalam proses, mekanisme dan bentuk resistensi yang dilakukan masyarakat lingkaran tambang. (komunitas lokal) berhadapan dengan negara dan korporasi. Wawancara I2, I8, I9, I10 Maret – April 2009.

³⁶ Terungkap dalam Sarasehan Tambang yang diadakan JPIC Keuskupan Ruteng, JPIC SVD, JPIC OFM bersama NGO dan elemen-elemen masyarakat lingkaran tambang di Reo, Manggarai, 25 – 26 Maret 2009.

³⁷ Terungkap dalam pertemuan masyarakat lingkaran tambang dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dalam tatap muka dengan Pemkab Manggarai Timur di Borong, 30 Maret 2009.

³⁸ JPIC OFM menerbitkan kertas posisi berkaitan dengan resistensi lokal atas rencana eksploitasi emas di Lembata (2007) dan advokasi terhadap masyarakat lingkaran tambang akibat operasi tambang Mangan di Manggarai (2008).

umum dan kecenderungan yang terjadi berkaitan dengan dominasi negara dan korporasi terhadap masyarakat lingkaran tambang.³⁹

Dua persoalan pokok yang dikemukakan perjuangan media massa lokal. **Pertama**, posisi negara dalam kaitannya dengan industri tambang. Publik memberikan catatan kritis dan mencermati dasar-dasar kebijakan tambang yang dikeluarkan negara (pemerintah daerah). Dengan ini ada usaha untuk memeriksa dasar-dasar sosial dan ekologi kebijakan tambang. **Kedua**, posisi korporasi dalam praktek tambang. Aspek ketidakadilan yang muncul dari praktek tambang menjadi salah satu hal penting yang terungkap dalam resistensi masyarakat lingkaran tambang melalui media massa

Elemen-elemen lokal terutama institusi Gereja Katolik dan NGO yang memiliki jaringan dan akses ke dalam pers lokal mengajukan argumentasi-argumentasi yang lebih luas berkaitan dengan resistensi lokal terhadap dominasi korporasi dan negara. Usaha mempublikasikan dampak-dampak destruktif operasi tambang menjadi salah satu gerakan yang dianggap efektif terutama membangun kesadaran publik untuk melakukan resistensi lokal.

4.3.7.4 Protes

Reaksi terhadap mekanisme penetrasi kaum kapitalis (korporasi) dan negara (regulasi) bisa muncul dalam bentuk revolusi rakyat. Bentuk lainnya yang bisa muncul adalah kekerasan lokal. Dalam studi yang dilakukan dalam konteks negara berkembang, protes publik terhadap dominasi korporasi dan negara, muncul dalam skala yang lebih kecil. Protes lokal menjadi satu bagian penting dari resistensi lokal terhadap dominasi korporasi dan negara. Lokal, dengan argumentasi kuat, menyusun protes. Hal ini dilakukan untuk mengimbangi posisi dominan korporasi dan negara. Protes lokal koheren dengan penyusunan bentuk '*pembangunan lain*.'⁴⁰

³⁹Elemen-elemen lokal menggunakan media massa lokal sebagai salah satu alat gerakan resistensi lokal terutama berkaitan dengan isu-isu penting seperti kehancuran lingkungan akibat operasi tambang.

⁴⁰Konsep ini merujuk pada pengutamaan kepentingan lokal terutama berkaitan dengan prinsip keberlangsungan, keadilan dan kesejahteraan yang harus menjadi bagian dari politik dan praktek pembangunan P. Ekins. (1992). *A New World Order: grassroot movements and global Change*. London: Routledge, p. 23

Ada tiga elemen penting yang melakukan protes lokal. Tiga elemen ini membentuk kesatuan resistensi lokal.⁴¹ Pertama, kelompok pertama yang melakukan protes adalah masyarakat yang mengalami proses marginalisasi. Proses peminggiran ini berhubungan dengan berbagai macam aspek seperti rusaknya kesehatan, kehilangan pekerjaan atau ketiadaan ruang kehidupan akibat eksploitasi yang dilakukan korporasi.

Kedua, kelompok kedua yang melakukan protes adalah kelompok yang melihat ketiadaan tempat untuk komunitas lokal dalam proses regulasi dan investasi korporasi. Mereka menjadikan protes sebagai bagian dari usaha mengosiasikan kembali posisi komunitas lokal. Kelompok pertama ini melihat adanya peluang untuk terlibat dalam operasi korporasi dengan regulasi yang lebih adil yang diberikan negara kepada korporasi.

Ketiga, kelompok terakhir yang melakukan protes adalah para intelektual dan bagian dari komunitas lokal yang memiliki pengetahuan dan informasi signifikan berkaitan dengan korporasi, peran negara maupun persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pendekatan pembangunan, ekologi dan prinsip pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat lokal.

Kelompok ketiga ini akan menjadi simpul penting untuk menyatukan basis protes lokal terhadap mekanisme korporasi dan regulasi negara (pemerintah). Pengetahuan dan informasi yang dimiliki kelompok ini membantu pergerakan lokal untuk mengimbangi super dominasi dua kekuatan lainnya.

Kelompok ketiga ini memberikan andil besar dalam konteks protes lokal yang terjadi di Manggarai berkaitan operasi PT SJA dan semua mekanisme regulasi dan izin KP baru. Protes lokal yang dibangun bersama institusi agama dalam cara tertentu dilakukan dengan satu kepercayaan dan keyakinan bahwa pemerintah dapat mempertimbangkan aspirasi dan aspek lokal dalam setiap kebijakan pemberian izin KP baru terhadap kehadiran korporasi tambang di Manggarai. Protes lokal juga berhubungan dengan dampak-dampak yang telah ditimbulkan operasi tambang di

⁴¹ M. Friberg and B. Hettne. (1985). The Greening of the World: toward a non-deterministic model of global processes in H. Addo (eds), *Development as Social Transformation: Reflection on the global Problematique*, Hodder and Stoughton, Sevenoaks, for the United Nations University, pp. 204 – 220.

daerah ini. Protes masyarakat lingkaran tambang juga diajukan secara sistematis melalui penyampaian surat kepada Pemkab Manggarai dan Manggarai Timur.⁴²

4.3.7.5 Sabotase⁴³

Strategi sabotase digunakan sebagai jalan untuk melumpuhkan kelompok dominan dan menguasai wilayah kekuatan. Sabotase banyak diarahkan pada prasarana vital seperti logistik. Namun, yang menjadi sasaran tidak hanya sarana-sarana vital tetapi juga sarana-sarana tambahan yang tampaknya tidak penting untuk keberlangsungan operasi korporasi. Dari studi lapangan penulis menemukan bahwa sabotase yang dilakukan masyarakat lingkaran tambang pada awalnya memang berkaitan dengan aksi sporadis namun dengan memberikan efek menentukan dalam menghadapi dominasi korporasi, sabotase kemudian menjadi salah satu pilihan bentuk resistensi lokal.

Dalam praktek yang dilakukan masyarakat lingkaran tambang, ada sabotase besar yang mempunyai sasaran luas dan pengaruh sistematis jangka panjang. Sabotase ini mempunyai sasaran tidak hanya bersifat sementara, tetapi terutama sasaran struktural dan ideologis.⁴⁴ Dalam level makro sabotase melihat faktor vital apa yang menopang kekuatan korporasi. Dengan penghancuran faktor vital ini maka kelompok dominan akan kehilangan basis kekuatan. Dari studi lapangan yang dilakukan penulis ditemukan bahwa masyarakat lingkaran tambang melakukan sabotase dengan jalan menutup akses transportasi yang biasa dilewati korporasi

⁴² Surat dari masyarakat adat satar teu pada tanggal 3 april berkaitan dengan klarifikasi atas kesepakatan antara masyarakat dengan PT Aditya Bumi pertambangan (9/2/2009) dibuat pada 3/4/2009 : tiga lingko = sumber kehidupan generasi mendatang. Dibuat masyarakat adat satar teu yang menolak kehadiran tambang. Masyarakat kampung waso juga mengadakan hal yang sama pada 24/3/2009. Permintaan Pembatalan KP Eksploitasi PT Arumbai Mangabekti yang dilakukan masyarakat adat kampung Luwuk dan dan Masyarakat Adat Kampung Rawang 22/3/2009 dan 23/3/2009 dengan alasan: kelangsungan hidup, kepunahan ekosistem dan ekologi, penyakit dan sanitasi, kemungkinan pembukaan tempat judi dan prostitusi dan peluang menciptakan konflik, secara geografis Pulau Flores dinilai terlalu kecil untuk industri tambang, selain untuk mengembangkan budaya pertanian. Masyarakat adat kampung Roket, 17/3/2009, pemuka adat masyarakat waekara pada 9/1/2009, juga pengambilalihan tanah yang menjadi hak ulayat masyarakat adat satar teu dengan alasan korporasi mendapatkan izin eksploitasi dari Pemkab

⁴³ Sabotase berasal dari kata "sabotage" yang berarti mensabot, atau merusak. Namun, dalam konteks gerakan resistensi lokal di Manggarai berkaitan dengan operasi tambang sabotase lebih diartikan dengan menghalangi sebagian proses operasi tambang.

⁴⁴ Gerakan resistensi lokal memiliki pijakan pada pengalaman masyarakat lingkaran tambang sebagai komunitas yang mengalami marginalisasi. Resistensi lokal memiliki dimensi struktural dengan fokus pada perubahan kebijakan maupun pola operasi tambang.

untuk mengangkut hasil eksploitasi. Masyarakat lingkaran tambang menutup jalan menuju areal operasi tambang.⁴⁵

Strategi sabotase ini biasanya melibatkan orang-orang biasa dari masyarakat lingkaran tambang. Hal ini menunjukkan 'kedekatan' antara masyarakat lingkaran tambang dengan dampak-dampak operasi tambang terhadap keberadaan dan keberlangsungan komunitas adat. Elemen-elemen lokal terutama NGO lokal yang melakukan advokasi mendampingi masyarakat lingkaran tambang untuk melakukan sabotase dengan 'cara damai' tanpa melakukan perusakan-perusakan aset-aset korporasi. Orang-orang biasa yang terlibat dalam sabotase ini membentuk sistem sabotase yang konstruktif terhadap resistensi lokal. Sabotase sebagai bentuk resistensi lokal menjadi pilihan strategi yang digunakan untuk menumbangkan kekuatan dominan korporasi.

Operasi tambang berkaitan dengan regulasi yang sebelumnya tidak memperhatikan aspek-aspek lokal. Regulasi menjadi simbol dominasi negara terhadap masyarakat lingkaran tambang. Studi lapangan yang dilakukan penulis menemukan kenyataan bahwa dukungan lokal seringkali diperoleh dengan jalan 'manipulasi' terutama berkaitan dengan mekanisme sosial (budaya) untuk membenarkan operasi tambang. Kesepakatan lokal yang tidak melibatkan sebagian besar masyarakat lingkaran tambang digunakan sebagai pembenaran kehadiran korporasi tambang. PT SJA menggunakan mekanisme sosial (budaya) ini untuk mendapatkan dukungan lokal terhadap proses operasi di areal tambang.

Masyarakat lingkaran tambang biasanya melakukan sabotase terhadap mekanisme sosial yang dilakukan korporasi untuk mendapatkan dukungan lokal. Elemen-elemen masyarakat lingkaran tambang melakukan sabotase atas kesepakatan yang dianggap korporasi memperkuat posisinya di areal operasi tambang.

Tujuan sabotase yang dilakukan masyarakat lingkaran tambang terutama untuk menghambat operasi tambang dan mempersulit implementasi regulasi yang cenderung merugikan masyarakat lingkaran tambang. Resistensi lokal yang dilakukan masyarakat lingkaran tambang memasukan sabotase sebagai salah satu pilihan tindakan yang dipandang efektif untuk menghadapi dominasi korporasi.

⁴⁵Wawancara dengan KM dan DS, dua orang tokoh masyarakat lingkaran tambang di sekitar areal operasi PT SJA dan PT ABM, 28 Maret 2009 dan 20 April 2009.

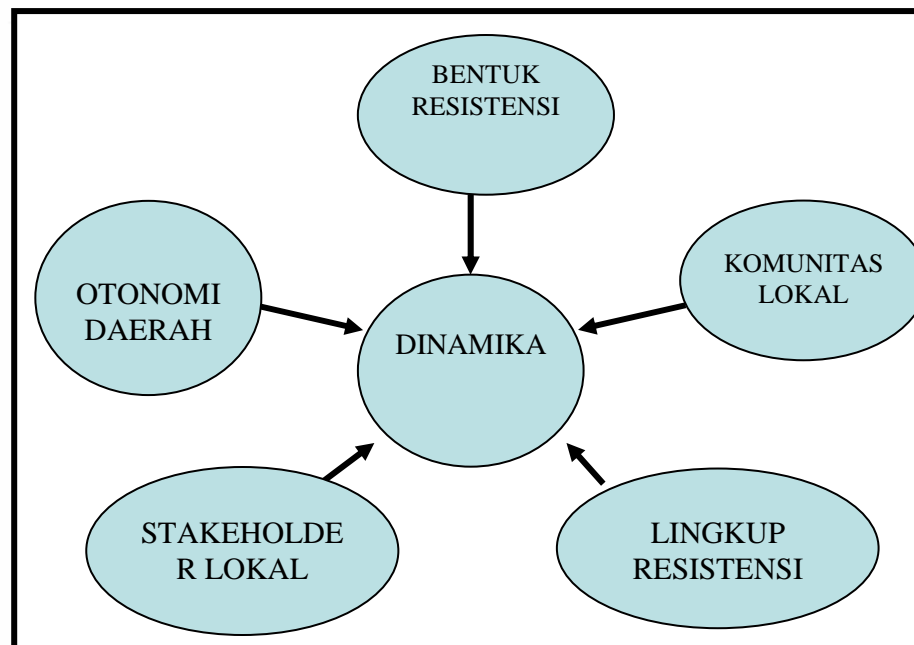
Tabel 4.4. Bentuk Resistensi Lokal

No	Bentuk	Fokus	Pencapaian
1	Rapat Umum	- Identifikasi Resistensi lokal dengan simbol kesatuan adat/budaya dalam bentuk rumah adat -	Kedaulatan lokal masyarakat lingkaran tambang
2	Diplomasi Penduduk	- Memperkuat hubungan antar tokoh kunci masyarakat lingkaran tambang - Memperkuat informasi tentang operasi tambang	Soliditas internal masyarakat lingkaran tambang
3	Publikasi	- Menggunakan ruang diskusi publik (media massa) sebagai bagian resistensi lokal. - Stakeholder lokal menerbitkan kertas posisi berkaitan dengan regulasi yang tidak adil dan dampak destruktif operasi tambang	- Resistensi yang dibangun masyarakat lingkaran tambang mendapatkan tanggapan yang luas secara drastis. - Resistensi masyarakat lingkaran tambang menjadi bagian dari perjuangan lokal secara meluas.
4	Protes	- Masyarakat lingkaran tambang menyampaikan surat-surat pengaduan kepada negara mulai dari level paling bawah (desa) hingga Pemkab - Masyarakat lingkaran tambang membuat surat penolakan atas kehadiran korporasi tambang	- Negara meninjau kembali kebijakan atas korporasi tambang yang sudah menjalankan eksploitasi maupun rencana pemberian izin kepada korporasi yang baru
5	Sabotase	- Masyarakat lingkaran tambang menutup akses bagi korporasi untuk masuk ke dalam areal operasi - Masyarakat lingkaran tambang melakukan sabotase pada alat-alat dan mesin-mesin korporasi tambang	- Korporasi menghentikan operasi tambang - Meluasnya solidaritas atas resistensi masyarakat lingkaran tambang.

4.3.8 Analisis

Ada beberapa faktor penting yang mendorong resistensi lokal dalam konteks tambang di Manggarai. Resistensi ini menunjuk pada dinamika hubungan antara negara, korporasi dan komunitas lokal (masyarakat ingkar tambang). Faktor-faktor ini membentuk satu kesatuan pengaruh umum terhadap resistensi lokal. Faktor-faktor ini (**gambar 4.3**) merupakan kesatuan pengaruh terhadap resistensi lokal.

Gambar 4.3 Analisis Dinamika Resistensi



Otonomi daerah dengan implikasi politik dan sosial yang signifikan menjadi faktor munculnya resistensi lokal. Secara politik, otonomi daerah memberikan kewenangan luas bagi pemerintah daerah untuk menyusun regulasi berkaitan dengan kebijakan pertambangan. Kewenangan ini bisa menguntungkan masyarakat lokal dengan menciptakan regulasi yang melindungi kepentingan lokal. Kewenangan ini juga bisa mengancam keberlangsungan lokal melalui regulasi yang menguntungkan korporasi.

Perubahan pandangan masyarakat lokal tentang tambang merupakan salah satu faktor penting yang mendorong resistensi. Perubahan pandangan ini terutama

berkaitan dengan posisi elemen-elemen (stakeholder) lokal yang semakin kuat untuk memberikan informasi tentang tambang kepada masyarakat lokal. Perubahan-perubahan ini mendorong resistensi lokal yang lebih kuat kepada korporasi dan pemerintah.

4.4 Sebab Resistensi

4.4.1 Pendahuluan

Bagian ini akan membahas sebab-sebab resistensi lokal. Dalam pembahasan ini term lokal lebih mengacu pada kehadiran masyarakat lingkaran tambang dalam keseluruhan konteks industri tambang di Manggarai. Konteks dinamika lokal dalam aspek sosial, politik, budaya dan ekonomi terutama dalam situasi otonomi daerah dan suasana turunan reformasi memberikan latar belakang atau menjadi bagian dari dinamika persoalan yang muncul. Dinamika lokal terutama berkaitan dengan persoalan otonomi daerah menentukan munculnya sebab resistensi lokal khususnya yang dimunculkan masyarakat lingkaran tambang terhadap industri tambang.

Studi lapangan yang dilakukan penulis sepanjang Maret dan April 2009 terutama berkaitan dengan posisi masyarakat lingkaran tambang (komunitas lokal) dalam hal ini menunjukkan beberapa variabel sebab resistensi lokal.

Pertama, dominasi yang mengacu pada posisi kuat negara dan korporasi. Dua kekuatan ini cenderung memiliki kepentingan yang sama yang berorientasi pada akumulasi keuntungan.⁴⁶ **Kedua**, marginalisasi masyarakat lingkaran tambang akibat regulasi yang berikan negara sebagai justifikasi operasi tambang. **Ketiga**, degradasi ekologis berkaitan dengan menurunnya kualitas lingkungan hidup sebagai basis kehidupan masyarakat lingkaran tambang. Keberlangsungan hidup menjadi isu penting dalam variabel sebab ini. **Keempat**, degradasi sosial budaya dengan menurunnya tata kelola sosial akibat konflik dan benturan budaya yang terjadi akibat kehadiran korporasi tambang. **Kelima**, sirkulasi kemakmuran yang menjadi tujuan kebijakan pertambangan dalam kerja sama negara dan korporasi tidak terjadi dalam operasi

⁴⁶Orientasi keuntungan menjadi perhatian utama korporasi. Kalkulasi profit ini sangat mempengaruhi paradigma korporasi dalam membangun hubungan dominatif terhadap masyarakat lingkaran tambang. Hal ini terungkap dalam wawancara penulis dengan LM (Manajer Lokal PT SJA), 28/3/2009 di Reo, Manggarai.

tambang. Operasi tambang menyebabkan dan memperkuat kemiskinan masyarakat lingkaran tambang.

Lima sebab resistensi ini muncul bersamaan dalam kerangka persoalan industri tambang di Manggarai. Pengurutan pembahasan variabel sebab ini tidak menentukan besar kecil volume sebab resistensi. Penjelasan variabel-variabel sebab memudahkan pembahasan.

4.4.2 Sebab Resistensi

4.4.2.1 Dominasi⁴⁷

Dominasi menggambarkan posisi satu atau lebih kekuatan (elemen) yang menguasai elemen lainnya dalam konstruksi sosial. Dominasi berdekatan dengan kapasitas yang melampaui keberadaan elemen lain. Dominasi berarti kekuatan dan implementasi kekuasaan tanpa kontrol. Penulis menemukan dari studi lapangan kenyataan umum menyangkut penguasaan korporasi dan negara terhadap semua aspek yang berkaitan dengan industri tambang di Manggarai. Penguasaan ini tidak hanya berhubungan dengan praktek tambang melainkan keseluruhan proses penyusunan regulasi yang dikeluarkan negara. Kekuatan negara dan korporasi melampaui posisi dan kepentingan masyarakat lingkaran tambang.⁴⁸

Regulasi dan Operasi tambang bergerak tanpa kontrol lokal karena kekuatan masyarakat lingkaran tambang sudah dilumpuhkan dalam mekanisme yang dilakukan negara dan korporasi. Elemen-elemen lokal belum memiliki posisi cukup kuat untuk mengawasi keseluruhan persoalan tambang di Manggarai. Korporasi dapat mengatur alur operasi dengan waktu yang singkat dan akumulasi keuntungan yang besar. Keadaan ini semakin menambah dominasi korporasi terhadap masyarakat lingkaran tambang.

Salah satu cara korporasi menunjukkan dominasi adalah dengan menerapkan mekanisme kerja 'represif' baik terhadap masyarakat lingkaran tambang maupun

⁴⁷ Korporasi membangun dominasi atas masyarakat lokal dengan biaya besar melalui akumulasi pendapatan dan profit yang mereka terima dari investasi modal dalam bentuk eksploitasi sumber daya alam, Lihat Laporan Komisi Dunia mengenai lingkungan hidup dan pembangunan dalam *Our Common Future*.(1977). Oxford: Oxford University Press, pp. 49 – 52.

⁴⁸ Pemerintah Provinsi NTT menandatangani MoU dengan sebuah perusahaan Korea Selatan senilai 650 miliar dalam pengelolaan Mangan, - Mangan untuk Kemakmuran Rakyat dalam *Pos Kupang edisi 21/4/2009*.

terhadap negara dengan menyediakan regulasi 'bersahabat' kepada korporasi. Proses eksploitasi sumber daya alam dijalankan dengan justifikasi tanpa batas baik secara formal juridis maupun sosial. Korporasi dengan kekuatan dominan menerapkan pengawasan dan pengelolaan aset dengan target menguntungkan pihak mereka secara berlebihan. Dari studi lapangan ditemukan indikasi kuat bahwa dominasi cenderung berkembang menjadi 'sindikat' kejahatan yang dilindungi sistem regulasi. Ada pemaksaan kehendak yang melampaui kepentingan masyarakat lingkaran tambang.⁴⁹

Sebuah lembaga investasi di bidang pertambangan harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat dan mengikuti prosedur yang sudah ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku. Proses kegiatan pertambangan biasanya dimulai dengan SKIP (Surat Kuasa Izin Pemantauan) yang disusul dengan izin kuasa pertambangan (KP) yang diberikan kepala daerah (Mineral Galian B dan C) dan atau Menteri ESDM atas nama Presiden RI (untuk Mineral galian A). Izin KP meliputi KP penyelidikan umum, KP eksplorasi, dan KP eksploitasi.⁵⁰

Namun, dalam kasus tambang di Manggarai ada indikasi kuat bahwa terjadi tumpang tindih prosedur perijinan, mekanisme dan koordinasi antar dinas pemerintah (negara), sebagaimana terlihat dalam beberapa hal berikut ini.⁵¹ *Pertama*, pemberian izin eksploitasi di hutan lindung. Wilayah Soga 1 dan 2 yang sekarang ini sedang dieksploitasi oleh PT Sumber Jaya Asia dengan investor dari China merupakan hutan lindung yang berada dalam RTK 103.⁵²

Pemerintah membiarkan begitu saja PT Sumber Jaya Asia merambah hutan, menghancurkan bukit yang selama ini dilindungi dan bukit itu mengalami kehancuran karena pengambilan mineral mangan dengan menggunakan dinamit⁵³ yang punya efek destruktif tanpa terlebih dahulu mendapat izin pinjam pakai dari

⁴⁹Perbaikan pengawasan aset, sindikat kejahatan yang dilindungi, pemaksaan kehendak atas sistem kerja represif di areal komunitas lokal. John McBeth. (1989). "The Boss System," in *Far Eastern Economic Review*, 14/9/1989, pp. 36 – 43

⁵⁰Lihat Undang-Undang Pertambangan No. 11 tahun 1967

⁵¹Sejumlah NGO lokal melakukan studi dan advokasi lapangan dan menemukan ketidakjelasan pendasaran regulasi yang diberikan negara kepada korporasi. Hal ini terungkap dalam wawancara dengan Rony Marut, Koordinator LSM YBDM pada 27 April 2009 di Ruteng, Manggarai.

⁵²Dalam Undang-Undang Kehutanan No. 41 tahun 1999 pasal 38 ayat 3, ditegaskan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan baru dilakukan setelah mendapat izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan.

⁵³Wawancara I3, I11, I12, I14, I32, I8 (Maret – April 2009 di Reo, Manggarai) menyebutkan bahwa pembongkaran Mangan dengan menggunakan dinamit telah menimbulkan kehancuran pada bukit-bukit pengangah hujan.

Menteri Kehutanan.⁵⁴ Mekanisme dan koordinasi yang tidak jelas ini tentu saja menguntungkan perusahaan. Mereka seolah-olah tidak mau tahu apakah wilayah ini masuk dalam kawasan hutan lindung atau tidak. Yang penting bagi korporasi adalah menghitung hasil dari usaha pengerukan Mangrove. Korporasi memang merasa resah ketika mengetahui bahwa Soga 1 dan 2 berada dalam kawasan hutan lindung. Tapi menariknya pihak perusahaan terkesan menghindar dan menyalahkan perusahaan sebelumnya yang sudah melakukan eksploitasi.⁵⁵

Kedua, ketidakmampuan Pemkab Manggarai untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pertambangan juga terlihat ketika berbicara tentang tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pengembangan masyarakat atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*.⁵⁶ Menariknya pemerintah sendiri sebenarnya sudah tahu bahwa perusahaan punya tanggung jawab dalam pengembangan masyarakat, hanya saja pemerintah terkesan mengikuti saja kemauan perusahaan. Dan yang lebih tragis lagi untuk sebuah tindakan demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pemerintah terkesan membela perusahaan.

Persoalannya ialah perusahaan pertambangan ini bekerja di wilayah pemerintahan Kabupaten Manggarai. Ini berarti bahwa pemerintah mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan memanggil perusahaan kalau perusahaan tersebut tidak melakukan persyaratan yang sudah ditentukan dalam perundang-undangan pertambangan. Dan pemerintah sebenarnya punya posisi tawar dengan perusahaan ketika terjadi peralihan KP dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Perusahaan yang menambang di Bonewangka misalnya, pertama kali KPnya dimiliki oleh PT Aneka Tambang, yang kemudian mengalihkannya ke PT Istindo Mitra Perdana. Selanjutnya PT Istindo Mitra Perdana mengalihkannya lagi ke PT

⁵⁴Lihat surat menyurat antara PT SJA, Pemkab Manggarai dan Departemen Kehutanan, SK Bupati Manggarai NTT hingga 2012 berdasarkan SK Bupati No: HK/287/2007, 5/10/2007 dari PT Tribina Sempurna kepada PT SJA, Surat Menteri Kehutanan RI, No:S.41/Menhut-VII/2009, 27 Januari 2009.

⁵⁵PT SJA merupakan perusahaan tambang yang meneruskan operasi dari PT Indomineral dan PT ABM yang memindahkan lokasi pembongkaran di areal lain dengan jarak berdekatan dengan lokasi operasi sebelumnya.

⁵⁶Terungkap dalam Seminar Sehari tentang Kebijakan Pemkab Manggarai berkaitan dengan industri tambang. Kepala dinas pertambangan Kabupaten Manggarai, Ir. Maximus Ngkeros mengatakan bahwa pengembangan masyarakat itu tergantung pada kondisi sosial masyarakat di lokasi pertambangan, Ruteng 18 Desember 2008.

Sumber Jaya Asia yang sekarang ini sedang melakukan eksploitasi di Bonewangka dan Soga 1 dan 2 di kecamatan Reok.⁵⁷

Ketiga, ada indikasi bahwa Pemerintah berpihak kepada perusahaan atau investor. Karena perusahaan menjawab obsesi Pemerintah bahwa potensi tambang harus dieksploitasi demi kepentingan kesejahteraan masyarakat. Pemikiran ini memperkuat anggapan bahwa pembangunan harus tertuju kepada kesejahteraan rakyat, sebagaimana tertuang dalam UUD 45, pasal 33. Tetapi tujuan pembangunan itu tidak akan tercapai ketika masyarakat lingkaran tambang yang seharusnya menjadi subyek pembangunan dijadikan sebagai obyek kepentingan korporasi.

Keberpihakan pemerintah kepada perusahaan juga terlihat dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada warga masyarakatnya. Aspek keadilan publik tidak dirasakan masyarakat lingkaran tambang (komunitas lokal). Hal ini berkaitan dengan mekanisme pemberian dasar hukum investasi korporasi tambang. Pemerintah 'membiarkan' saja perusahaan tambang yang datang dan merusak hutan lindung dan kerusakan itu sulit dipulihkan ke keadaan aslinya. Masyarakat tidak bisa melakukan penolakan karena izin KP dianggap sebagai kebijakan 'dari atas' yang harus ditaati oleh masyarakat lokal.⁵⁸

Indikasi lain terkait keberpihakan pemerintah kepada perusahaan atau investor tambang adalah ditempatkannya alat negara-polisi di lokasi industri tambang mangan untuk mengamankan aset perusahaan dari gangguan pihak luar (masyarakat). Paling tidak melalui izin penggunaan bahan peledak aparat negara sudah mendapatkan 'bagian' tertentu dari operasi tambang. Masyarakat selalu dianggap pengganggu aktivitas tambang. Di negara ini, sudah menjadi pengetahuan umum, di mana ada industri pertambangan beroperasi, di sana ditempatkan juga alat negara, baik polisi maupun tentara.⁵⁹

Keempat, ketiadaan kejelasan mekanisme dan koordinasi di level Pemkab berdampak negatif pada masyarakat di lokasi pertambangan. Dua indikasi nyata dari hal ini dapat ditemukan pada masyarakat berupa miskinnya pemahaman masyarakat

⁵⁷SK Bupati Manggarai NTT hingga 2012 berdasarkan SK Bupati No: HK/287/2007, 5/10/2007 dari PT Tribina Sempurna kepada PT SJA, Surat Bupati Manggarai, No: 711/Tamben/VIII/2008, 25/8/2008 perihal: penghentian sementara eksploitasi kepada PT Sumber Jaya Asia

⁵⁸Wawancara: I1,I2,I3, I8,I9,I10, I28, I29 (Maret – April 2009 di Reo dan Ruteng, Manggarai).

⁵⁹Ada indikasi keterlibatan kelompok militer dalam proses pembuatan kesepakatan masyarakat lingkaran tambang dalam kerangka menerima dan menyetujui kehadiran korporasi tambang.

tentang kehadiran pertambangan di wilayah mereka. Masyarakat mengaitkan perusahaan pertambangan dengan pemerintahan. Karena proses hanya terjadi antara pihak perusahaan dengan pemerintah tanpa melibatkan masyarakat. Kenyataan ini menunjukkan satu hal penting yang diabaikan, yakni proses konsultasi publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sebelum sebuah KP diterbitkan dan sebelum sebuah perusahaan melakukan aktivitas pertambangan di sebuah wilayah. Masyarakat menilai pemerintah penguasa yang harus ditaati dan ditakuti karena mereka bekerja untuk kepentingan masyarakat.⁶⁰

Dominasi merupakan gambaran ketidakseimbangan hubungan korporasi, negara dan komunitas lokal. Kepentingan komunitas lokal tidak menjadi bagian dari persoalan korporasi dan negara. Korporasi tambang bisa tetap menjalankan operasi (rencana operasi) meskipun ada banyak penolakan yang muncul dari masyarakat setempat.⁶¹

Tabel 4.5 Dominasi Korporasi dan Negara

Deskripsi	Aspek	Bentuk	Dampak	Catatan
Kekuatan monolitik yang terbentuk dari konsolidasi negara dan korporasi	-Regulasi -Operasi	-SK Pemkab (izin KP) tanpa memperhatikan aspek lokal (masyarakat lingkaran tambang) -Operasi (praktek) tambang tanpa memperhitungkan keberadaan masyarakat lingkaran tambang	Dominasi menyebabkan semakin melemahnya posisi masyarakat lingkaran tambang dalam dinamika hubungan dengan negara dan korporasi	Regulasi yang diberikan negara kepada korporasi dan operasi tambang yang dijalankan korporasi berlangsung tanpa kontrol masyarakat lingkaran tambang

Dominasi korporasi mengakibatkan munculnya beragam masalah dan efek destruktif dari operasi tambang. Pelaksanaan operasi PT SJA dan PT ABM bisa membekukan kebijakan regulatif negara. Gambaran dominasi ini tidak memberikan ruang kontrol publik yang kuat. Korporasi menentukan volume kegiatan dan tingkatan risiko serta besarnya areal operasi tanpa memperhitungkan kondisi masyarakat lingkaran tambang.

⁶⁰Wawancara dengan DS terungkap dalam penyampaiannya "Kami tidak bisa buat apa-apa karena pemerintah bilang, mereka dapat izin langsung dari Jakarta. Mereka punya uang dan kita tidak bisa buat apa-apa dengan mereka yang punya uang. Mereka bilang sekarang mereka di Bonewangka, setelah Bonewangka habis, orang naik yang digusur sekarang Soga", (20/4/2009)

⁶¹Terungkap dalam wawancara dengan RM (NGO) dan I8,I9,I10 (27 April 2009)

4.4.2.2 Marginalisasi

Marginalisasi koheren dengan dominasi yang dimiliki negara dan korporasi. Dominasi memiliki gerak searah dengan marginalisasi. Dominasi yang dilakukan negara dan korporasi menciptakan pola marginalisasi terhadap komunitas lokal. Ada kondisi yang menyebutkan bahwa marginalisasi menyebabkan penerimaan sosial terhadap kehadiran korporasi dengan dukungan regulasi dari negara. Marginalisasi dilakukan korporasi dan negara agar dominasi keduanya semakin kuat.

Dalam kerangka hubungan ketiga elemen ini, marginalisasi menimbulkan 'ketimpangan' hubungan. Ketidakseimbangan ini menjadi basis terjadinya ketidakadilan terhadap komunitas lokal. Sementara ketidakadilan harus tetap dilakukan agar komunitas lokal yang mengalami proses marginalisasi tidak mampu membangun kekuatan setara yang dimiliki korporasi dan negara. Marginalisasi berkaitan dengan aspek-aspek vital keberadaan komunitas lokal.

Studi lapangan yang dilakukan penulis dalam kasus tambang di Manggarai disimpulkan bahwa marginalisasi⁶² merupakan bagian dari keberadaan masyarakat lingkaran tambang berkaitan dengan posisinya terhadap korporasi dan negara. Korporasi dan negara melakukan proses marginalisasi terhadap masyarakat lingkaran tambang. Dua kekuatan ini menempuh beragam cara untuk memperkuat marginalisasi terhadap masyarakat lingkaran tambang.

Penulis menemukan bahwa bentuk marginalisasi paling awal yang dilakukan negara dan korporasi adalah menutup dan memutuskan akses bagi masyarakat lokal ke dalam rangkaian informasi tentang tambang. Pemutusan akses informasi ini dilakukan negara dan korporasi agar masyarakat lingkaran tambang tidak memiliki posisi tawar yang kuat ketika berhadapan dengan dua kekuatan ini. Padahal posisi tawar dapat dibangun masyarakat lingkaran tambang pada saat mereka memiliki informasi yang benar tentang tambang.

Kondisi ini menyebabkan masyarakat lingkaran tambang tidak mampu mengukur 'layak' atau 'tidak layak' operasi tambang dilakukan di Manggarai. Ketiadaan akses informasi ini menjadi salah satu variabel penting yang dapat

⁶² Marginalisasi mendeskripsikan kenyataan penyingkiran masyarakat lingkaran tambang (MLT) (komunitas lokal) terhadap kebijakan negara dan operasi korporasi berhubungan dengan tambang di Manggarai. Peminggiran ini berkaitan dengan multi-aspek kehidupan MLT bukan saja aspek ekologis melainkan juga aspek-aspek lain seperti sosial, budaya dan politik.

menggamabrkan ketidakadilan terhadap masyarakat lingkaran tambang akibat proses marginalisasi yang dilakukan negara dan korporasi. Marginalisasi yang dilakukan dua elemen ini menjadikan tambang tambang sebagai urusan eksklusif negara dan korporasi.⁶³

Berkaitan dengan operasi tambang PT SJA dan PT ABM di Manggarai berkembang gejala yang cukup kuat bahwa korporasi dan negara sengaja ‘menyembunyikan’ informasi dan pengetahuan tentang tambang. Masyarakat lingkaran tambang tidak pernah mendapatkan informasi secara lengkap menyangkut keseluruhan operasi dua perusahaan tambang ini. Praktek tambang yang dilakukan dua korporasi ini menjadi sebuah aktivitas ‘misterius’ untuk masyarakat lingkaran tambang.⁶⁴

Berkaitan dengan regulasi atau izin KP kepada dua korporasi tambang ini masyarakat lingkaran tambang tidak pernah memiliki pengetahuan dan informasi pasti jadwal operasi. Bahkan masyarakat lingkaran tambang menganggap kehadiran dua korporasi ini dalam dua dekade terakhir sebagai hal yang biasa. Marginalisasi sistematis yang dilakukan korporasi dan negara menyebabkan hilangnya kesadaran masyarakat lingkaran tambang soal operasi tambang yang ada. Dominasi yang dimiliki PT SJA dan negara memperkuat ‘ketidakberdayaan’ masyarakat lingkaran tambang untuk mendapatkan penjelasan yang benar tentang praktek tambang ini.⁶⁵ Komisi JPIC SVD⁶⁶, OFM⁶⁷ dan Keuskupan Ruteng⁶⁸ dalam kaitannya dengan persoalan ini menegaskan adanya persoalan-persoalan penting berkaitan dengan keseluruhan konteks tambang di Manggarai.

⁶³Masyarakat lingkaran tambang menekankan bahwa masyarakat lokal di sekitar areal operasi tambang harus menjadi syarat mutlak kebijakan negara berkaitan dengan tambang. Aspirasi-aspirasi lokal ini menjadi bagian dari wacana yang berkembang di tingkat lokal, lihat *Flores Pos*, 3/7/2007.

⁶⁴Wawancara: I1,I2,I3,I8,I9,I10, I18,I20 (Maret – April 2009 di Reo dan Ruteng, Manggarai)

⁶⁵ Hasil wawancara dengan I1, I6, I8, I12, dan I15. Bahkan sebagian besar narasumber dan pemberitaan lokal menyebutkan persoalan yang mirip.

⁶⁶SVD atau singkatan dari Societas Verbi Divini (serikat Sabda Allah) merupakan salah satu Tarekat Religius dalam Gereja yang sudah berusia tiga abad. Serikat ini bersifat internasional dan berkarya multiaspek. Keutuhan lingkungan hidup dan kelestarian ekologi merupakan salah satu perhatian tarekat religius ini.

⁶⁷OFM (Serikat Para Miskin) merupakan salah satu Tarekat Religius dalam Gereja yang sudah berusia enam abad. Serikat religius ini bersifat internasional. Keutuhan ciptaan merupakan salah satu perhatian utama Kongregasi OFM.

⁶⁸Gereja Keuskupan adalah Gereja setempat yang dipimpin seorang Uskup. Gereja lokal Keuskupan tidak ditentukan atau tidak berhubungan dengan distrik administrasi pemerintahan. Gereja Lokal keuskupan Ruteng mencakup tiga kabupaten yaitu Manggarai, Manggarai Barat dan Manggarai Timur. Gereja lokal Keuskupan Ruteng memiliki perhatian utama pada keberlangsungan kehidupan baik manusia maupun ekologi.

Selain informasi yang berkaitan dengan regulasi atas praktek tambang yang tidak dimiliki masyarakat lingkaran tambang, aspek penting lain yang tidak diketahui masyarakat lingkaran tambang adalah substansi operasi tambang. Pola, mekanisme, volume dan areal operasi PT SJA dan PT ABM dibuat untuk tidak diketahui masyarakat lingkaran tambang. Bahkan ada gejala cukup kuat yang menegaskan praktek ‘manipulasi’ keabsahan operasi yang dilakukan korporasi terhadap masyarakat lingkaran tambang. Manipulasi ini menyebabkan masyarakat lingkaran tambang menerima praktek tambang tanpa pertimbangan kritis.⁶⁹

Penulis menemukan kenyataan di lapangan bahwa untuk memperkuat proses marginalisasi, korporasi mengangkat orang lokal untuk menempati posisi penting dalam manajemen perusahaan. Biasanya ‘orang lokal’ ini memiliki beberapa prasyarat yang dianggap korporasi tepat untuk ‘dimanfaatkan’ sebagai representasi korporasi dalam hubungannya dengan masyarakat lingkaran tambang. ‘Orang lokal’ ini memiliki kewibawaan sosial, jaringan keluarga dan pengaruh yang besar dalam masyarakat lingkaran tambang.⁷⁰ Korporasi menganggap cara semacam ini tepat untuk memperkuat kedudukan sekaligus dan pengaruh korporasi di sekitar masyarakat lingkaran tambang. Orang lokal ini dipergunakan korporasi untuk menghadapi berbagai macam kebutuhan yang berkaitan dengan MLT. ‘Tokoh lokal’ ini sekaligus menjadi peredam resistensi lokal terhadap praktek tambang.⁷¹

Elemen-elemen penting dari masyarakat lingkaran tambang seperti tokoh adat dan kepala lingkungan menganggap ‘orang lokal’ yang angkat korporasi ke dalam manajemen perusahaan telah menukar ‘*kedaulatan lokal*’ dengan posisi dan gaji besar yang diterimanya dari perusahaan. Bahkan, ‘orang lokal’ ini seringkali melakukan distorsi informasi dua arah timbal balik antara korporasi dan masyarakat lingkaran tambang. Posisi dan peran yang dijalankan ‘orang lokal’ dalam perusahaan

⁶⁹Sirise adalah satu bagian dari MLT di sekitar areal operasi PT ABM. Selama belasan tahun terakhir Sirise mengalami berbagai macam bentuk degradasi berkaitan dengan kehidupan mereka. MLT di Sirise tidak mengetahui dengan pasti dan jelas operasi tambang PT ABM. Dampak paling besar adalah kerusakan lingkungan yang menyebabkan kehancuran kelangsungan hidup mereka sebagai petani. Lihat laporan Flores Pos yang dibuat Siti Maemunah dari JATAM dengan judul – Kisah Pulu dari Sirise, *Flores Pos*, 10/8/2006.

⁷⁰Orang lokal direkrut korporasi untuk menduduki posisi penting dalam manajemen perusahaan. Korporasi ‘memanfaatkan’ orang lokal untuk meredam resistensi lokal terhadap operasi tambang.

⁷¹Wawancara I5, I6, I8 (Maret – April 2009 di Reo dan Ruteng, Manggarai) sebuah penegasan bahwa tokoh lokal yang direkrut korporasi memiliki peran penting untuk memperkuat kedudukan korporasi. Tokoh lokal ini dianggap mampu melakukan pendekatan dan lobi terhadap masyarakat lingkaran tambang. Ini dianggap menjadi bagian dari proses marginalisasi masyarakat lingkaran tambang.

ini mengaburkan banyak persoalan penting berkaitan operasi tambang dan hak-hak yang harus diperoleh masyarakat lingkaran tambang.⁷²

Marginalisasi dialami masyarakat lingkaran tambang dalam kaitannya dengan regulasi yang diberikan negara kepada korporasi.⁷³ Masyarakat lingkaran tambang tidak pernah menjadi bagian penting yang dipertimbangkan negara dalam proses penentuan kebijakan dalam bidang pertambangan dan secara spesifik dalam konteks penerbitan izin KP. Izin operasi tambang PT SJA, PT ABM dan beberapa izin KP sesudahnya diberikan tanpa memperhitungkan posisi masyarakat lingkaran tambang yang memiliki hak ulayat atas kawasan dan menghadapi dampak langsung operasi tambang. Negara mengabaikan kesatuan hidup masyarakat lingkaran tambang dengan kawasan yang menjadi sumber kehidupan mereka. Negara melepaskan posisi masyarakat lingkaran tambang dari keseluruhan proses penyusunan kebijakan daerah dalam bidang investasi pertambangan.

Tabel 4.6 Marginalisasi MLT

Deskripsi	Aspek-aspek	Bentuk	Dampak	Catatan
MLT (Komunitas lokal dikeluarkan dari keseluruhan konteks industri tambang)	1. Juridis (Izin KP) 2. Operasi 3). Dampak	1). Hegemoni Pemkab 2). Areal tidak diketahui MLT, Distorsi informasi bagi MLTT 3). Perekrutan 'tokoh lokal' dalam manajemen korporasi 3). Polusi udara, air, dan rusaknya ekosistem untuk nafkah	1). Operasi tanpa kontrol MLT 2). Tambang tidak transparan untuk MLT 3). Kerentanan multi aspek yang dialami MLT (ekonomi, budaya, ekologi, sanitasi)	Marginalisasi dijalankan secara sistematis melalui operasi korporasi dengan dukungan basis juridis-formal yang tidak menempatkan aspek 'lokal' sebagai salah satu pertimbangan penting dalam kebijakan negara.

⁷²Penulis menemukan kenyataan bahwa orang lokal yang direkrut korporasi seringkali melakukan distorsi informasi dua arah, antara korporasi dan masyarakat lingkaran tambang. Namun, lebih sering orang lokal ini bekerja untuk kepentingan korporasi. Wawancara: I1 (20/4/2009).

⁷³ Dalam UU Minerba 2009, aspek daerah dalam hal ini berkaitan dengan posisi dan kedudukan MLT merupakan salah satu bagian penting yang harus diperhatikan dalam memberikan izin KP kepada korporasi tambang.

Tabel di atas menggambarkan proses marginalisasi yang dilakukan korporasi dan negara terhadap masyarakat lingkaran tambang. Marginalisasi ini terutama berkaitan dengan mekanisme regulasi dan pola operasi serta dampak-dampak destruktif yang dialami masyarakat lingkaran tambang. Kebijakan negara dalam bidang pertambangan, khususnya operasi tambang PT SJA dan PT ABM tidak mempertimbangkan posisi masyarakat lingkaran tambang.⁷⁴

Marginalisasi ini mengakibatkan semakin mengecilnya hubungan antara masyarakat lingkaran tambang dengan keseluruhan tata kehidupan (ekologi). Masyarakat lingkaran tambang tidak dapat menjangkau aspek keadilan terhadap operasi tambang dan regulasi yang diberikan negara. Marginalisasi yang dialami masyarakat lingkaran tambang dapat digambarkan dalam kondisi keadaan di mana masyarakat lingkaran tambang kehilangan kawasan, tanah, dan lahan pertanian untuk mendukung keberlangsungan hidup. Marginalisasi menyebabkan masyarakat lingkaran tambang kehilangan kontak dengan basis kehidupan.⁷⁵

4.4.2.3 Degradasi Ekologi⁷⁶

Pembangunan dan lingkungan merupakan dua persoalan penting yang telah menjadi perhatian utama dalam beberapa tahun terakhir ini. Saat ini, bagaimana menyusun politik dan praktik pembangunan yang tidak menghancurkan ekologi menjadi bagian dari usaha dunia. Ada satu masalah yang selalu muncul bahwa lingkungan hidup dengan sumber daya yang ada di dalamnya telah dijadikan sebagai modal utama pembangunan. Praktek pembangunan semacam ini telah menumbuhkan

⁷⁴Persoalan operasi tambang hanya menjadi bagian dari komunikasi dua arah antara Pemkab dan korporasi tanpa menunjukkan keterlibatan masyarakat lingkaran tambang secara signifikan. Surat-surat resmi antara dua kekuatan ini secara eksplisit menunjukkan marginalitas masyarakat lingkaran tambang terhadap seluruh persoalan tambang di Manggarai.

⁷⁵Masyarakat lingkaran tambang akan membentuk identitasnya sebagai pengungsi lingkungan hidup akibat pola eksploitasi tanpa batas atas sumber daya alam yang pada akhirnya menghilangkan basis dan lingkungan kehidupan masyarakat lokal. Lihat, Jodi L. Jacobson. (1988). *Environmental Refugees: A Yardstick of Habitability*, *Worldwatch Paper 86*, p. 6

⁷⁶Kenneth E. Boulding.(1968). "The Economics of The Coming Spaceship Earth," dalam Henry Jarret (ed.), *Environmental Quality in A Growing Economy*. Baltimore: MD: The Johns Hopkins University Press, pp. 3-14

sikap, seruan dan gerakan sosial untuk melakukan transformasi politik pembangunan sehingga memberikan perhatian pada aspek keberlangsungan ekologi.⁷⁷

Studi yang dilakukan penulis menemukan adanya hubungan antara politik pembangunan dan investasi dalam bidang pertambangan. Pembangunan di tingkat lokal Manggarai diterjemahkan dalam kebijakan pertambangan. Dengan demikian argumentasi yang menyebutkan isu keberlangsungan ekologi sebagai persoalan penting dalam kaitannya dengan politik pembangunan menjadi hal penting untuk dianalisis lebih lanjut.

Selama ini, degradasi ekologi sudah menjadi bagian utama persoalan tambang di Manggarai. Kerusakan lingkungan permanen terjadi di sekitar kawasan operasi tambang PT SJA dan PT ABM.⁷⁸ Kerusakan ini berkaitan dengan tanah, ekosistem hutan, tercemarnya air, hilangnya sumber mata air, rusaknya ekosistem laut di sekitar lokasi tambang, efek penggunaan bahan-bahan peledak yang dipakai, belum lagi bencana yang akan menyusul seperti banjir, longsor, kemarau panjang, dan kebakaran hutan.⁷⁹

Sejak lama operasi tambang yang dilakukan PT SJA dan PT ABM menimbulkan kerusakan hutan. Proses pembongkaran tanah menyebabkan kehancuran di areal operasi dengan dampak-dampak yang mengerikan. Degradasi lingkungan yang terjadi di kawasan operasi PT Arumbai juga menyebabkan turunnya debit air minum dari warga masyarakat sekitarnya. Penurunan derajat lingkungan nampak dari berkurangnya air dari sumber mata air yang biasanya menjadi tempat bagi masyarakat lingkar tambang mengambil air untuk keperluan mereka setiap hari.⁸⁰

Selain berkurangnya debit air minum bagi masyarakat lingkar tambang, operasi tambang mangan di kawasan ini mengancam sanitasi air yang dibutuhkan masyarakat lingkar tambang. Keadaan ini memperbesar rasa keterancaman

⁷⁷ Pembangunan dengan pola pertumbuhan merupakan pendekatan konvensional yang telah menyebabkan berkurangnya kemampuan ekonomi-ekologi global beberapa dekade terakhir ini. Lihat, James Robertson.(1990). *Future Wealth: A New Economics for The 21th Century*. London: Cassel Publishers Limited.

⁷⁸Observasi lapangan yang dilakukan penulis pada bulan Maret dan April menunjukkan kehancuran lingkungan yang terus meluas. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas kualitas kawasan hutan, tanah dan lahan pertanian masyarakat lingkar tambang.

⁷⁹ Wawancara I1, I2, I12, I15, I32 (Maret – April, Reo dan Ruteng Manggarai).

⁸⁰ME, seorang guru SD di Satar Teu (28/3/2009) mengungkapkan bahwa debit mata air di Satar Teu di dekat areal operasi PT ABM semakin menurun dalam tiga tahun terakhir. Ia menyebutkan bahwa sumber mata air akan hilang jika PT ABM terus menjalankan operasi lima tahun ke depan.

masyarakat lingkaran tambang. Kerusakan terjadi sebagai akibat operasi tambang terbuka (open pit) dengan pola membongkar pohon dan tanah untuk mengambil mangan yang ada di dalamnya. Pola ini menimbulkan sejumlah lubang besar tanpa penutup.⁸¹

Dari kenyataan yang ada di lokasi pertambangan, kerusakan tanah nampak melalui lubang-lubang bekas galian yang dibiarkan menganga begitu saja setelah perusahaan menyelesaikan operasinya. Proses reklamasi yang disepakati oleh perusahaan tidak ditepati. Kalaupun direklamasi, dari segi guna tanah lokasi-lokasi bekas pertambangan tidak layak untuk aktivitas pertanian.

Inilah yang terjadi dengan masyarakat desa Satar Punda, Kecamatan Lambaleda, semenjak kehadiran PT ABM beroperasi di wilayah itu. Tanah *Lingko* (ulayat) masyarakat yang dulu menjadi tempat bergantungnya hidup dengan tanaman perkebunan rakyat, kini menyisakan lubang-lubang yang menganga lebar, dan meyerupai danau karena digenangi lumpur hitam dan air ketika musim hujan. Ini tentu berisiko banjir dan longsor yang akan menimbulkan bencana yang tentu tidak sedikit untuk masyarakat sekitar lokasi pertambangan.

Tanah-tanah pertanian perkampungan sekitar, seperti Luwuk dan Lengko Lolok pun ikut tercemar akibat limbah tambang yang mengenai tanah, lokasi pertanian, dan sumber air masyarakat. Curah hujan yang sangat rendah di kawasan ini sudah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat lingkaran tambang. Keadaan ini bertambah parah lagi sesudah korporasi tambang mulai beroperasi dalam kurun dua dekade terakhir ini. Warga yang berada di sekitar areal operasi tambang merasakan dampak langsung dan sangat berat berkaitan dengan penurunan kualitas lingkungan ini. Hancurnya kawasan hutan Torong Besi sebagai akibat operasi PT SJA beberapa tahun telah mengurangi curah hujan di kawasan ini.⁸²

Hal ini disebabkan karena Kawasan Hutan Torong Besi merupakan daerah tangkapan hujan bagi warga masyarakat di sekitar tambang. Semakin berkurangnya curah hujan jelas memunculkan banyak efek lain bagi masyarakat yang semuanya hidup dalam alam budaya pertanian. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian bagi warga komunitas lokal untuk menjalankan aktivitas pertanian sebagai bagian dari

⁸¹ Wawancara I1, I2, I12, I15, I32.

⁸² Kerusakan di sekitar PT SJA dan PT ABM menjadi lebih nyata terutama berkaitan dengan keberadaan kawasan hutan tangkapan hujan yang telah berubah menjadi areal operasi tambang.

kehidupan mereka. Musim tanam tidak pernah tetap dan jelas karena curah hujan yang tidak pernah menentu bahkan hilang sama sekali.

Selain dampak pencemaran atas tanah dan berkurangnya curah hujan, operasi tambang di Manggarai juga menyebabkan rusaknya kondisi dan ekosistem hutan. Hutan menutupi hampir 39,80 % (sebelum pemekaran Manggarai Timur) kawasan Kabupaten Manggarai. Dari 39,80 % itu, 30,2 % merupakan kawasan hutan lindung, 1 % untuk kawasan hutan cagar alam, dan 23,7 % untuk taman nasional (Walhi, 2003:10-11)⁸³. Yang menyedihkan, lokasi pertambangan di Kabupaten Manggarai persis menempati salah satu lokasi kawasan hutan lindung, yang tentu menjadi ancaman ekologis sangat serius. Lokasi pertambangan di Soga 1 dan 2, daerah Torong Besi, Kecamatan Reok yang dieksploitasi oleh PT. SJA melakukan kegiatan pertambangan persis di kawasan hutan lindung ini dalam RTK 103. Masuknya pertambangan, pertama-tama terjadi alih fungsi hutan secara besar-besaran. Kawasan hutan lindung di sana, yang berfungsi sebagai penyangga dan penyeimbang kehidupan, terjaganya keanekaragaman hayati (*biodiversity*), penyeimbang iklim dan juga merupakan pendukung perkonomian masyarakat sekitar, tinggal kenangan yang tak akan pernah kembali lagi, semenjak industri “keruk” pertambangan masuk ke sana. Selain itu, limbah industri tambang, seperti yang ada di Bonewangka (PT SJA), daerah Torong Besi, Kecamatan Reok, sudah mencapai pemukiman penduduk dan laut. Resiko longsor ketika musim hujan dapat merusak dan mengancam pemukiman penduduk.⁸⁴

Dampak ekologis lanjutan dari industri pertambangan di daerah ini juga menyangkut rusak dan terganggunya ekosistem laut. Beberapa lokasi pertambangan yang ada, yang dieksploitasi oleh PT. ABM dan PT SJA berada sangat dekat dengan laut, dan tentu saja, limbahnya dibuang ke laut. Hal yang jelas menyangkut ini terjadi di sekitar lokasi pertambangan Torong Besi, Desa Robek, Kecamatan Reok, dan Satar Punda, Kecamatan Lambaleda. Di desa Robek ini terdapat satu lokasi pantai pasir putih yang menjadi pusat obyek wisata bahari, yaitu pantai Ketebe.⁸⁵

⁸³ John M. Prior, *The Church and Land Disputes: Sobering Thoughts from Flores (Manuscript)*, Maumere: tanpa tahun. Hlm. 12.

⁸⁴ Wawancara I1, I2, I3, I10 (Maret – April 2009)

⁸⁵ Keputusan Bupati Manggarai No. 4 Tahun 2004 tentang Penetapan Lokasi Obyek Wisata di Kabupaten Manggarai.

Selain itu, di areal oprasi PT ABM, terjadi polusi udara yang tinggi. Debu mangan dan guncangan akibat peledakan yang dilakukan korporasi menjadi ciri dari kerusakan ekologi di kawasan ini. Debu mangan merembes masuk ke rumah-rumah warga dan mereka tidak bisa menghindar dari kenyataan ini dan tidak bisa melakukan relokasi tempat tinggal sebab mereka sudah lama kehilangan hak atas tanah yang sudah diambil korporasi.⁸⁶

Tabel 4.7 Degradasi Ekologis

Deskripsi	Bentuk	Dampak	Catatan
1). Penurunan Derajat Ekologis akibat pola dan mekanisme operasi tambang yang dilakukan korporasi 2). Pembunuhan ekologi, perusakan total lingkungan hidup	1). Menurunnya debit air minum 2). Rusaknya hutan tangkapan hujan 3). Rusaknya pantai untuk sumber penghidupan	1). Terancamnya keberlangsungan hidup masyarakat lingkaran tambang (ekonomi, budaya, sosial, dll)	Degradasi ⁸⁷ lingkungan merupakan isu paling penting dalam konteks resistensi masyarakat lingkaran tambang terhadap operasi PT SJA dan PT ABM di Manggarai, maupun kehadiran korporasi-korporasi baru

Tabel di atas menunjukkan dampak kerusakan lingkungan dari operasi tambang di kawasan ini yang dilakukan PT SJA dan PT ABM. Operasi tambang ini memperkuat terjadinya *'ecocide'* dalam kawasan masyarakat lingkaran tambang⁸⁸. Operasi tambang sama artinya dengan proses penghancuran lingkungan hidup, pembunuhan lingkungan hidup secara tidak terbatas. Tahap-tahap operasi yang dilakukan KP Mangan di kawasan ini menciptakan degradasi ekologi dengan dampak-dampak langsung yang merugikan masyarakat lingkaran tambang.

⁸⁶ Lihat Laporan Siti Maemunah (JATAM), Kisah Pilu dari Sirise, FP, 10/8/2006.

⁸⁷ Degradasi ekologi berkaitan dengan keberlanjutan sosial masyarakat lingkaran tambang, terungkap dalam wawancara dengan semua narasumber dari komunitas lokal, aktivis dan pihak Gereja (Maret – April 2009).

⁸⁸ Ecocide berhubungan dengan operasi tambang sebagai proses penghancuran lingkungan hidup, pembunuhan lingkungan hidup secara tidak terbatas. Konsep ini diperkenalkan oleh P. Blaikie.1985. *The Political Economy of Soil Erosion in Developing Countries*, Longman: London, p. 138

4.4.2.4 Degradasi Sosial-Budaya⁸⁹

Sumber daya alam (SDA) bukan elemen tunggal yang terpisah dari keberadaan masyarakat lokal (MLT). Sumber daya alam berada dalam keseluruhan konteks kehidupan masyarakat lokal. Artinya, SDA harus dipandang dan diperlakukan dalam perspektif sosial, politik dan budaya komunitas lokal.⁹⁰ Pembangunan dengan basis pengelolaan SDA tanpa batas, dalam pengertian eksploitasi masif terhadap SDA, justru menimbulkan persoalan sosial budaya. Hal ini berkaitan keberlangsungan tata sosial budaya masyarakat lokal. Pengelolaan SDA tanpa batas akan menghasilkan penghancuran aspek sosial budaya komunitas lokal. Dua persoalan ini memiliki korelasi kuat.⁹¹

Masyarakat lingkaran tambang adalah sebuah komunitas dengan tata sosial budaya yang menggambarkan erat alam (ekologi). Nilai-nilai sosial budaya menentukan keberlangsungan hidup masyarakat lingkaran tambang. Selain itu, tata nilai sosial budaya sesungguhnya menggambarkan inti hubungan antara manusia dengan alam di sekitarnya. Nilai-nilai sosial budaya yang menentukan kehidupan masyarakat lingkaran tambang ditentukan dengan bagaimana mereka menjaga hubungan dengan alam kehidupan.⁹²

Pengelolaan SDA dengan memperhatikan hak sosial budaya masyarakat merupakan satu persoalan penting dalam konteks industri tambang. Perwujudan hak-hak sosial budaya menjadi satu hal penting yang dapat dijadikan standar untuk mengevaluasi dan menganalisis keberadaan korporasi tambang. Masyarakat

⁸⁹ Komnas HAM mengulas secara relatif lengkap soal perspektif sosial budaya dari pengelolaan sumber daya alam, lihat Komnas HAM. (2006). *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdimensi HAM (Tinjauan Teori dan Prinsip-prinsip Universal dan Implementasinya di Indonesia)*

⁹⁰ Beberapa dekade terakhir dunia menyadari satu kekeliruan besar dan amat berbahaya ketika memperlakukan Sumber daya alam sekadar sebagai modal ekonomi tanpa memperhitungkan aspek-aspek sosial dan budaya yang melekat dalam 'pengertian' SDA. Lihat, Kenneth E. Boulding. (1968). "The Economics of The Coming Spaceship Earth.", pp. 3-14

⁹¹ Dalam arti tertentu SDA mengandung 'kontradiksi' ekologi. Lihat, David Pearce, Anil Markandya dan Edward B. Barbier, *Blueprint for A Green Economy* (London: Earthscan Publication, Ltd. 1989, pp. 10-11 (15). Robert Constanza, "What is Ecological Economics in Ecological Economics, Vol. I No. 1, 1989, pp.1 – 7

⁹² Terungkap dalam wawancara dengan mantan karyawan lokal PT ABM AL seorang tokoh muslim di Kecamatan Reo (26/3/2009).

Manggarai memiliki pemahaman tentang dirinya dan alam lingkungannya. Pemahaman sosial budaya ini secara substansial memiliki karakter ekologis.⁹³

Keutuhan dan kesempurnaan hidup orang Manggarai ada dalam harmoni kosmik. Religiositas orang Manggarai bertumpu dan bersumber pada visi diri dan lingkungan yang amat kosmik dan ekologis. Orang Manggarai akan kehilangan identitas kultural religius ketika mengalami kerusakan tatanan kosmik. Orang Manggarai akan kehilangan kearifan hidup kalau kehilangan alamnya.

Pertama, menyangkut *alam kebersamaan*. Orang Manggarai senantiasa melihat dirinya dalam hubungan dengan orang lain.⁹⁴ Pembentukan kampung juga menyangkut cara berpikir *sosial-kolektif*. Kampung tradisional di Manggarai umumnya berbentuk lingkaran, di mana terdapat sebuah *Mbaru gendang/Mbaru tembong* (rumah adat kolektif), sebuah *Natas* (halaman kampung), sebuah *Pa'ang* (gerbang kampung), dan sebuah *Compang* (altar korban). Selain itu kearifan orang Manggarai menyangkut juga harmonisasi antara *Manusia – Alam – Dunia Adikodrati*.

Hal ini nampak dalam beberapa acara adat seperti *Penti* (perayaan syukur pasca-panen), yang melibatkan seluruh warga kampung dan bersama-sama mengantar sesajen kepada roh-roh pelindung kampung, roh-roh nenek moyang yang secara bersama dilakukan di *Mbaru Gendang* (rumah adat kolektif). Harmonisasi ini akan punah mengingat pertambangan sedikit demi sedikit mengeruk dan menggusur tanah-tanah, yang oleh orang Manggarai tidak hanya dipahami dari aspek ekonomi saja, sebagai penyedia kebutuhan manusia, melainkan sebagai warisan leluhur. Tanah dalam kosmologi Manggarai adalah simbol kehidupan dan identitas manusia Manggarai. Hilangnya tanah (*lingko*) akibat operasi tambang berarti hilangnya identitas dan dasar berada (*raison d'être*) orang Manggarai.⁹⁵

⁹³ Ada kesatuan antara kehidupan masyarakat dengan tanah dan seluruh kosmos, sebagaimana terungkap dalam (*ungkapan kiasan go'ét*): “*Gendang'n oné, lingko'n pé'ang; waé téku, compang dari; tana'n wa, awang'n éta; jéngok lé ulung, wiko lau wa'i; par awo, kolep salé (Rumah adat dan kebun adat, sumber air dan altar korban, bumi dan langit, hulu dan hilir, terbit dan terbenamnya matahari)*”. Wawancara dengan KA seorang tokoh budaya Manggarai (27 April 2009)

⁹⁴ Hal ini terungkap dalam ungkapan kiasan seperti ini: “*muku ca pu'u néka woléng curup, téu ca ambo néka woléng jangkong, ema agu anak néka woléng bantang, asé agu ka'é néka woléng taé.*” (Pisang seponon jangan lain omong, tebu satu rumpun, jangan lain tutur; ayah dan anak jangan lain sepakat; kakak dan adik jangan lain kata.” Wawancara: I30

⁹⁵ Eman Embu & Robert Mirsel (ed.). *Gugat: Darah Petani Kopi Manggarai*, Ledalero: Flores, 2004. pp. 25-26.

Dampak lain yang bisa dilihat dengan hadirnya pertambangan di Manggarai adalah soal-soal sosial-budaya. Beberapa hal yang menjadi soal dalam lingkup sosial budaya antara lain adalah rentannya konflik horizontal di antara masyarakat, maupun konflik vertikal antara masyarakat dengan pemerintah, dan juga kemungkinan konflik antara masyarakat lokasi tambang dengan pihak perusahaan, atau juga antara pihak perusahaan dengan karyawan.⁹⁶

Klaim pemilikan tanah di antara para tuan tanah menjadi persoalan tersendiri, yang bukan tidak mungkin menjadi potensi konflik di antara para pemilik tanah ulayat. Belum lagi dengan keturunan para tuan-tuan tanah tersebut. Di antara masyarakat sekitar lokasi tambang pun, kemungkinan konflik bisa saja terjadi di antara kelompok pro tambang dan kontra tambang; kelompok yang diuntungkan oleh industri tambang dengan kelompok yang merasa dirugikan oleh industri tambang.⁹⁷

Selain itu konflik horizontal dan vertikal seperti ini, juga akan sangat rentan terjadi manakala ada relokasi pemukiman penduduk ke tempat lain. Bukan saja mereka akhirnya menjadi “orang asing”, tetapi juga akan timbul konflik antara para pendatang baru dengan penduduk setempat. Perebutan sumber daya alam di tempat baru menjadi potensi konflik yang setiap saat bisa saja muncul.

Selain problem sosial, problem budaya juga akan muncul, terutama benturan budaya antara orang-orang asing dengan orang-orang lokal, pihak investor dengan masyarakat lokasi tambang. Hal itu menyangkut bahasa dan beberapa aspek budaya yang lain. PT SJA memperkerjakan sebagian kecil masyarakat lingkaran tambang pada perusahaan. Para buruh ini bekerja dengan ritme yang tidak menentu. Hal ini bergantung pada volume pekerjaan di areal operasi tambang.⁹⁸ Dengan ritme kerja yang tidak tetap seperti ini maka para pekerja juga tidak memiliki kepastian jam kerja dan jaminan lainnya. Dari wawancara yang dilakukan peneliti ditemukan kenyataan bahwa PT SJA tetap melakukan operasi pada saat tenaga kerja seharusnya

⁹⁶ Laporan tentang konflik antara buruh tambang dengan para mandor asing yang bekerja di lokasi tambang, Wawancara: II, I8, I10

⁹⁷ Banyak kejadian semacam ini terjadi di Sirise dalam kawasan operasi PT Arumbai. Dengan dukungan LSM setempat (Yayasan Bina Desa Mandiri) karyawan melakukan mogok kerja untuk menuntut standar kelayakan kerja dengan peralatan secukupnya. Meski demikian tidak semua tuntutan ini dipenuhi perusahaan. Hal ini terungkap dari wawancara dengan Rony Barut, Direktur YBDM di Ruteng tanggal 27 April 2009.

⁹⁸ Seperti dituturkan oleh DS tokoh adat/kampung Jengkalang, masyarakat lingkaran tambang di kawasan operasi PT SJA (20 April 2009, Reo, Manggarai)

menjalankan hak-hak menjalankan ibadah agamanya.⁹⁹ Korporasi yang memiliki hak penuh atas tenaga kerja menerapkan jam kerja yang bertentangan dengan hak-hak sosial budaya para pekerja. Hal ini merusak hubungan sosial antar warga di kawasan industri tambang yang dilakukan PT SJA. Sistem kerja semacam ini telah menyebabkan hancurnya pengakuan akan hak-hak sosial budaya dari tenaga kerja secara khusus dan masyarakat lingkaran tambang umumnya.

Kondisi ini pada aspek lain menghancurkan hubungan baik yang ada di tengah masyarakat. Pada satu sisi, para pekerja ini harus memenuhi tuntutan perusahaan dan sama artinya dengan mengingkari tata nilai sosial yang hidup. Pada sisi lain, mereka dianggap sebagai bagian dari korporasi yang menghancurkan tata kehidupan budaya komunitas lokal.

Korporasi sering mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengancam para buruh jika mereka tidak menjalankan pekerjaan pada jam-jam kerja yang dipaksakan korporasi. Dalam beberapa kasus para pekerja tidak dapat menjalankan ibadah agama karena harus mengikuti jadwal kerja yang ditetapkan korporasi.¹⁰⁰

Tabel 4.8 Degradasi Sosial Budaya

Deskripsi	Bentuk	Dampak	Catatan
Menurunnya kualitas sosial budaya masyarakat lingkaran tambang sebagai akibat implikasi operasi tambang	-Konflik adalah salah satu bentuk degradasi sosial budaya. Konflik ini terjadi secara horisontal, vertikal dan struktural. Ada sentimen pro kontra atas kehadiran tambang. - Peningkaran hak-hak sosial, budaya dan religius masyarakat lingkaran tambang	Salah satu dampak paling krusial yang dialami masyarakat lingkaran tambang adalah hilangnya identitas komunitas sebagai masyarakat petani dengan tata kelola sosial dengan perspektif ekologis yang kuat.	Operasi tambang merusak hubungan antara manusia dan lingkungan sebagai sumber nilai dan tata kelola sosial masyarakat lingkaran tambang. Dominasi korporasi terhadap para buruh yang diambil dari masyarakat lingkaran tambang menjadi pemicu pelanggaran hak-hak sosial budaya masyarakat lingkaran tambang.

⁹⁹Para buruh yang tidak mengikuti ritme dan jadwal kerja yang ditentukan korporasi diancam PHK oleh perusahaan. Para buruh terpaksa menjalankan pekerjaan meskipun dengan melanggar hak-hak budaya mereka sendiri. Hal ini terungkap dari wawancara dengan I1 pada 20 April di Jengkalang, Reo Manggarai.

¹⁰⁰Wawancara I1, I2,I3, I8, I9, I10, I16, I17,I20 pada Maret – April 2009 di Reo dan Ruteng, Manggarai.

Tabel di atas memberikan gambaran singkat bentuk-bentuk degradasi sosial budaya pada masyarakat lingkaran tambang. Bentuk-bentuk degradasi ini menimbulkan sejumlah dampak nyata bagi masyarakat lingkaran tambang terutama berkaitan dengan kualitas hubungan horizontal maupun tata nilai sosial budaya yang hidup di dalamnya. Operasi tambang menghancurkan kualitas sosial budaya masyarakat lingkaran tambang. Operasi tambang melemahkan sendi-sendi budaya dan kelembagaan hak-hak sosial budaya masyarakat lingkaran tambang.¹⁰¹ Korporasi tidak menerapkan mekanisme operasi dengan memperkuat tanggung jawab sosial berkaitan dengan apresiasi terhadap hak-hak publik di lingkungan operasi tambang. Padahal, pengakuan terhadap hak-hak sosial warga di sekitar tambang menentukan proses yang jauh lebih kuat tentang seberapa besar korporasi menerapkan manajemen pengelolaan sumber daya dengan memperhitungkan aspek-aspek sosial budaya yang mengikat hubungan antara masyarakat dengan sumber daya alam (lingkungan) yang ada.

4.4.2.5 Kemiskinan

Ekonomi dunia berada dalam jangkauan monopoli pengelolaan sumber daya alam. Pola ekonomi ini mengutamakan akumulasi keuntungan sebagai tujuan utama korporasi nasional maupun transnasional. Ketimpangan ekonomi dengan pembesaran volume kemiskinan pada masyarakat lokal terus menguat. Investasi ekonomi menjadi bagian dari proses pemiskinan masyarakat lokal.¹⁰²

Industri tambang berhubungan erat dengan akumulasi modal korporasi. Keuntungan (profit) menjadi orientasi tunggal operasi korporasi tambang. Manajemen pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan mekanisme yang paling menguntungkan korporasi. Sementara akumulasi keuntungan menempatkan masyarakat lingkaran tambang sebagai pihak yang selalu mengalami kerugian. Kerugian yang paling nyata adalah semakin besarnya ketidakmampuan masyarakat

¹⁰¹ Observasi yang dilakukan penulis menyimpulkan adanya pergeseran nilai-nilai sosial budaya maupun perubahan tata kelola sosial kehidupan masyarakat lingkaran tambang.

¹⁰² Monopoli ekonomi yang dibangun korporasi melalui akumulasi investasi tanpa batas menyebabkan sirkulasi kemakmuran yang terbatas pada pemilik modal. Lihat, Giovanni Andrea Cornia, "Economic Decline and Human Welfare in The First Half of the 1980's," in Giovanni Andrea Cornia, Richard Jolly, and France Stewart (ed). (1987). *Adjustment with a Human Face: Protecting the Vulnerable and Promoting Growth*. Oxford: Clarendon Press, p. 20

lingkar tambang menekan korporasi untuk menciptakan pembagian keuntungan yang adil.¹⁰³

Kasus tambang di Manggarai menegaskan kenyataan bahwa korporasi menjadi pihak yang bertambah kaya akibat akumulasi keuntungan, sementara masyarakat lingkaran tambang tidak mendapatkan pembagian pendapatan secara adil dari proses eksploitasi Mangan di kawasannya. Persoalan ini menguatkan satu kebiasaan yang diterapkan korporasi dalam mekanisme pengelolaan sumber daya alam yang menjauhkan masyarakat lingkaran tambang dari isu kemakmuran.¹⁰⁴

Studi yang dilakukan penulis dalam kasus tambang Mangan di Manggarai menemukan bahwa pengertian '*sirkulasi kemakmuran*'¹⁰⁵ sebagai pola yang dikembangkan korporasi dan negara perlu mendapatkan pertimbangan kritis. Ada kecenderungan yang kuat bahwa negara memberikan peluang kepada korporasi untuk mengatur alur pembagian pendapatan eksploitasi Mangan sesuai dengan ukuran yang ditetapkan korporasi dan negara.

Dengan konsep sirkulasi kemakmuran ini maka ditarik kesimpulan bahwa operasi tambang Mangan di Manggarai tidak memiliki implikasi signifikan untuk memperbaiki kehidupan ekonomis (kemakmuran) masyarakat lingkaran tambang. Penjelasan tentang korelasi kebijakan pertambangan dan kemakmuran melalui pembagian pendapatan untuk daerah menjadi penting untuk melihat implikasi positif tambang.

¹⁰³Wawancara: I1, I2,I3, I8,I9,I10, I11,I12,I13

¹⁰⁴Dalam ungkapan penuh ironi, kaya yang makin kaya, yang memiliki emas akan memerintah, yang memerintah akan merampok emasnya. Lihat Irma Adelman & Cynthia Taft Morris. 1983. *Economic Growth & Social Equality in Developing Countries*, Stanford University Press: Stanford

¹⁰⁵Sirkulasi kemakmuran diartikan pengaturan pendapatan eksploitasi tambang akan menciptakan kemakmuran untuk masyarakat lingkaran tambang. Pemasukan yang diterima negara akan membantu kegiatan-kegiatan yang menunjang kesejahteraan masyarakat lingkaran tambang.

Tabel 4.9. Peranan Sektor Ekonomi Terhadap PDRB Kabupaten Manggarai Tahun 2000-2003. Sumber : BPS Kabupaten Manggarai, 2004 ¹⁰⁶

Sektor	Peringkat	2001	2002	2003
1. Pertanian	1	60,45	59,34	53,71
2. Pertambangan dan Panggalian	7	2,42	2,47	2,45
3. Industri Pengolahan	8	0,86	0,85	1,04
4. Listrik dan Air Bersih	9	0,57	0,57	0,35
5. Bangunan / Konstruksi	4	7,58	7,59	7,44
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	3	8,93	10,3	10,26
7. Pengangkutan dan Komunikasi	5	3,85	3,45	4,19
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	6	2,37	2,32	2,85
9. Jasa – Jasa	2	12,97	13,1	17,71
PDRB		100,00	100,00	100,00

Dalam kasus PT SJA dan PT ABM, jumlah keuangan yang dijadikan sebagai pemasukan untuk daerah yang berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) kemudian digunakan untuk menjalankan program pembangunan ternyata jumlahnya sangat kecil dalam nilai kewajarannya. Pemasukan dari korporasi tambang tidak secara tetap menghubungkan kehadirannya dengan program pembangunan yang dapat menurunkan kemiskinan.¹⁰⁷ Keadaan ini sesungguhnya menunjukkan adanya ‘bayang-bayang’ yang dijanjikan korporasi kepada komunitas lokal terutama dampak positif kehadirannya secara ekonomis dapat mengangkat kehidupan warga lokal ke taraf kemakmuran dan kesejahteraan. Hal ini dapat dikonfrontasikan dengan keseluruhan perhitungan pendapatan korporasi dalam menjual Mangan hasil eksploitasi di kawasan ini.

¹⁰⁶ www.manggarai.go.id, diakses 22 April 2009

¹⁰⁷ Tidak ada korelasi positif antara operasi tambang dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat lingkaran tambang. Hal ini terungkap dalam wawancara dengan I1, I2, I3, I6, I7, I8, I9, I10, I12, I14, I15, I16, I17, Maret-April 2009, Reo dan Ruteng, Manggarai.

Tabel 4.10 Perhitungan harga mangan berdasarkan harga internasional untuk PT. Sumber Jaya Asia¹⁰⁸

Tahun Produksi	Kapasitas Produksi (Tahun/ton)	Pendapatan dalam Dollar/ton	Pendapatan dalam Rupiah 1\$=Rp 9000	Sumbangan bagi PAD + Biaya Reklamasi
2006	60.000	73.500.000 (1.225)	661.500.000.000	107.000.000
2007	60.000	243.000.000 (4.050)	2.187.000.000.000	107.000.000
2008	60.000	243.000.000 (4.050)	2.187.000.000.000	107.000.000
Total	180.000	559.500.000	5.035.500.000.000	321.000.000

Tabel di atas hanya salah satu perhitungan dari PT SJA tiga tahun terakhir, yang melakukan eksploitasi di Bonewangka, Torong Besi Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, tidak termasuk PT ABM yang beroperasi di Satar Punda, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur. Kapasitas produksi pertahun setiap perusahaan berbeda-beda.¹⁰⁹

Hasil operasi tambang sebagian besar hanya untuk keuntungan korporasi. Manggarai yang memiliki sumber daya mineral itu mendapatkan jumlah yang tidak sebanding dengan pendapatan korporasi. Belum ada alasan yang cukup sah untuk mengatakan bahwa kesejahteraan menjadi salah satu dampak dari operasi tambang PT SJA dan PT ABM. Yang terjadi adalah akumulasi keuntungan perusahaan, tanpa memiliki hubungan yang kuat dengan kesejahteraan masyarakat lingkaran tambang.

Volume kemiskinan bertambah besar juga karena operasi korporasi tambang telah menghancurkan ekonomi domestik masyarakat lingkaran tambang yang menggantungkan kehidupan pada bidang pertanian. Operasi tambang telah

¹⁰⁸ JPIC OFM, JPIC SVD, JPIC Keuskupan Ruteng mengolah data ini dalam Kertas Posisi yang dipublikasikan pada tahun 2008.

¹⁰⁹ Menurut Manager PT Sumber Jaya Asia, LM, setiap tahun perusahaan yang melakukan eksploitasi di Bonewangka, Torong Besi mengangkut hasil mangan ke China sebesar 60.000 ton. Sementara PT Arumbai Mangabekti yang melakukan eksploitasi di Lokasi Satar Punda sejak tahun 1999, setiap tahun mengangkut 45 ribu ton Mangan. Bahan ini diolah dan dianalisis berdasarkan hasil publikasi JPIC OFM dalam kertas Posisi tentang industri tambang di Manggarai (2008).

mengurangi tanah garapan. Kemiskinan disebabkan rendahnya kemampuan masyarakat lingkaran tambang untuk menyediakan pangan.¹¹⁰

Tabel 4.11 Kemiskinan MLT

Deskripsi	Aspek-aspek	Bentuk	Dampak	Catatan
- Operasi tambang tidak menciptakan kemakmuran untuk masyarakat lingkaran tambang - Sirkulasi pendapatan yang tidak adil	1. Ekonomis 2. Ekologis	1). Pemasukan untuk PAD yang tidak signifikan dengan jumlah pendapatan korporasi 2). Tanah yang tidak mampu menyediakan pangan bagi masyarakat	Masyarakat lingkaran tambang mengalami kemunduran kualitas kehidupan baik ekonomi maupun sosial. Kerentanan ini merupakan akumulasi proses pemiskinan yang dialami masyarakat lingkaran tambang	Konsep sirkulasi kemakmuran yang mengadai kan kemakmuran MLT dari bagi hasil korporasi melalui PAD (Pemerintah) tidak signifikan.

Tabel di atas memberikan gambaran yang jelas hubungan antara operasi tambang dengan kemiskinan masyarakat lingkaran tambang. Operasi tambang PT SJA dan PT ABM menyebabkan kehancuran basis ekonomi domestik yang menimbulkan kemiskinan masyarakat lingkaran tambang. Gambaran ini menjadi semakin jelas dengan mempertimbangkan posisi subordinan masyarakat lingkaran tambang. Kemiskinan yang menimpa masyarakat lokal paralel dengan persoalan melambatnya produksi pangan sebagai komunitas pertanian.¹¹¹ Hal ini sebagai akibat berkurangnya

¹¹⁰Operasi tambang menimbulkan kehancuran ekonomi domestik. Lihat, Bruce F. Johnston & Peter Kirby. (1975). *Agriculture and Structural Transformation: Economic Strategies in Late Developing Countries*. New York: Oxford University Press.

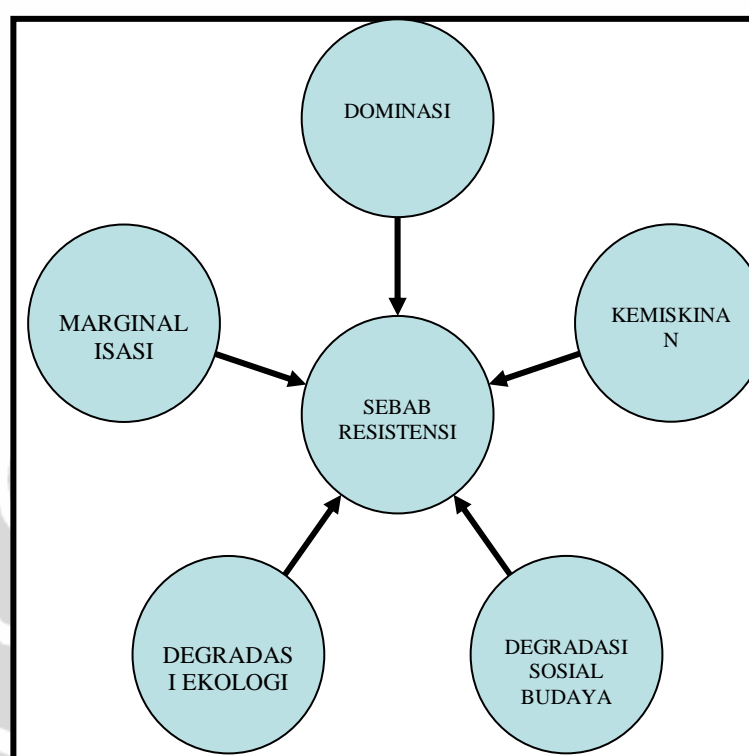
¹¹¹Salah satu persoalan penting yang muncul di belakang masalah besar operasi tambang adalah komunitas lokal yang kehilangan kemampuan mengantisipasi ketersediaan pangan. Dalam pengungkapan lain, masyarakat lingkaran tambang mengalami ancaman kemiskinan yang lengkap. Lihat, Lester R. Brown. (1988). "The Cahanging Food Prospects: The Nineties and Beyond, " *Worldwath Paper 85*. Washington DC: Worldwatch Institute, Oct. 1988.

lahan pertanian dan perubahan iklim akibat lanjutan dari degradasi ekologi di kawasan pertambangan.

4.4.3 Analisis

Studi yang dilakukan penulis menyimpulkan bahwa masyarakat lingkaran tambang mampu merumuskan sebab-sebab resistensi lokal setelah mendapatkan informasi yang relatif lebih lengkap tentang industri tambang. Ada lima (5) sebab utama dalam kerangka resistensi lokal (**gambar 4.3**). Lima (5) sebab ini: dominasi, marginalisasi, degradasi ekologis, degradasi sosial budaya dan kemiskinan merupakan rangkaian sebab terhadap resistensi lokal.

Gambar 4.3 Analisis Sebab Resistensi



Resistensi merupakan tanggapan lokal atas dominasi korporasi dan negara yang menempatkan masyarakat lingkaran tambang sebagai pihak lain yang tidak memiliki kekuatan ekonomi dan politik. Dominasi menjadi mekanisme paling penting yang dapat ditempuh negara dan korporasi untuk ‘melumpuhkan’ kekuatan masyarakat lingkaran tambang. Dari perspektif masyarakat lingkaran tambang, dominasi

merupakan sebab munculnya resistensi lokal. Studi lapangan yang dilakukan penulis menemukan kenyataan bahwa dominasi korporasi dalam konteks operasi tambang PT SJA dan PT ABM memunculkan resistensi lokal yang kuat. Marginalisasi masyarakat lingkaran tambang koheren dengan dominasi korporasi dan negara.

Degradasi ekologis lingkungan hidup memicu resistensi lokal terhadap keberlangsungan operasi tambang di kawasan ini. Hal ini menunjukkan bagaimana komunitas lokal mampu memilih satu di antara dua pilihan, menjaga keberlangsungan korporasi dengan akibat kerusakan ekologis yang lebih luas atau mempertimbangkan keberlangsungan hidup komunitas lokal. Masyarakat lingkaran tambang menemukan kenyataan bahwa operasi tambang PT SJA dan PT ABM tidak memenuhi aspek penting berkaitan dengan keberlangsungan lingkungan hidup masyarakat lingkaran tambang.

Masyarakat lingkaran tambang mendasarkan nilai-nilai sosial budaya dalam kerangka hubungan dengan alam dan lingkungan hidup di sekitarnya. Operasi tambang telah menghilangkan sebagian tanah dan kawasan sebagai sumber kehidupan. Nilai-nilai sosial mengalami kehancuran akibat kerusakan ekologis yang terjadi. Selain itu, penerapan jadwal kerja untuk para buruh yang ditetapkan PT SJA telah melanggar hak-hak religius masyarakat lingkaran tambang. Kemiskinan yang dialami masyarakat lingkaran tambang akibat berkurangnya kemampuan tanah untuk ketersediaan pangan merupakan sebab resistensi lokal. Peningkaran hak-hak religius (budaya) ini telah memicu resistensi lokal terhadap operasi tambang yang dilakukan PT SJA.

Tabel 4.12 Tabel Sebab Resistensi

No	Sebab	Fokus
1	Dominasi	Posisi Negara dan korporasi tanpa kontrol lokal
2	Marginalisasi	Mekanisme yang dijalankan korporasi dan negara untuk 'mengasingkan' masyarakat lingkaran tambang dari keseluruhan persoalan tambang (regulasi, operasi, dampak)
3	Degradasi ekologis	Menurunnya kualitas lingkungan terutama kawasan hutan, tanah dan ekosistem laut yang mempengaruhi kehidupan masyarakat lingkaran tambang sebagai masyarakat petani
4	Degradasi Sosial Budaya	Rusaknya tata kelola sosial masyarakat lingkaran tambang akibat penghancuran masif atas lingkungan hidup (kawasan, hutan dan tanah) yang memiliki hubungan dengan kehidupan manusia.
5	Kemiskinan	Konsep sirkulasi kemakmuran dengan mekanisme pembagian hasil antara negara dan korporasi tidak berkaitan secara signifikan dengan tingkat kesejahteraan MLT